

SKRIPSI

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim**



Oleh :

AYU LESTARI
NIM. 10975008156

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

PEKANBARU

2013

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya berupa keimanan, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***“Analisis Penerimaan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir”***.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat wajib guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan, baik dari segi refrensinya keterbatasan data maupun keterbatas pengetahuan yang dimiliki penulis, tetapi akhirnya semua hambatan itu Alhamdulillah dapat teratasi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kepada keluargaku tercinta, Ayahnda Muslim, Ibunda Rusminam (Almarhumah), Ibuk Sabariah, dan buat adik-adikku tersayang Dedi Sandra, Aulia Nabela, Khoiri Haziq, dan Fahri Romadhon yang telah memberikan semangat dan bantuan sehingga skripsi ini terselisaikan.

Kepada Nenekku tercinta Milah (Almarhumah), pak lung Rasyid, ibu nurmawar, ibu Oro, Bapak Kenang, Onik Saromai, Oom Siman pak cik Tengku achmad zainal, ocik salmiah, ulung Torina, abang iyan beserta keluarga besar lainnya terima kasih atas do'a yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Nazir, MA sebagai Rektor UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M.Ec sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Afrizal, S.Sos, M.si sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Bapak Riki Handri Malau, SE, MM selaku konsultasi proposal dan pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dalam penulisan proposal dan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya Dosen pada jurusan Administrasi Negara.
7. Kepada kepala Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir beserta pegawai yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Special untuk seseorang yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis
9. Kepada teman-teman satu kos, Wirda Afni, Wan Aisyah Ayu Anggraini, Herzafni Afiza, Siti Rafidah, dan dx Purpo Sari yang telah memberikan Motivasi dan bantuannya.

10. Kepada teman-teman tersayang, Halimah, Dini Hariyani, Dewi aidil Fitriawati, Khoirunnisak, Dwi Zulhijjah Fahri, Dede, Reni, Fasiha, Herlina, Nina, Fransiska, Dll terimakasih atas kebersamaan selama ini semoga kita nantinya bisa hidup sukses dan menjadi sahabat untuk selamanya.

11. Kepada Kawan-kawan ANA C angkatan 2009, terimakasih karena telah bersedia untuk menjadi teman seperjuangan ku selama ini.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kepada semua pihak, selain “Jazakumullah Kairan Katsiran” semoga Allah SWT memberikan balasan dan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya Rabb...

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Pekanbaru, Januari 2013
Penulis,

AYU LESTARI
10975008156

ABSTRAK

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

OLEH: AYU LESTARI

Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, pengelolaan pembangunan dan meningkatkan penerimaan daerah. Salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah yaitu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang dikelola oleh dinas pendapatan daerah kabupaten Rokan Hilir adalah pajak hotel. Semua sumber pendapatan dari penerimaan pajak hotel masuk kedalam kas daerah, termasuk penerimaan lainnya yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat serta pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sistem penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan sistem penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Jumlah populasi dan sampel pada penelitian ini adalah berjumlah 48 orang. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan penyebaran angket (Kuisisioner). Sedangkan jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Untuk menganalisa data ini penelitian ini peneliti melakukan pendekatan secara deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh yaitu data sekunder dan data primer berupa hasil observasi, wawancara dan penyebaran angket (kuisisioner). Setelah dilakukan analisa hasil penerimaan pajak hotel pada dinas pendapatan daerah kabupaten Rokan Hilir dapat dikatakan bahwa sumber dari pendapatan ini cukup besar, tetapi bila dilihat dari target terhadap realisasi penerimaan pajak hotel pada dinas pendapatan daerah kabupaten Rokan Hilir mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh sistem penerimaan pajak hotel pada dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir belum berjalan optimal.

Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak hotel belum terlaksana dengan baik karena banyaknya pengusaha hotel yang tidak mendaftarkan usahanya, pelaksanaan penetapan dan perhitungan pajak hotel masih dalam kategori kurang baik karena kegiatan perhitungan dan penetapan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir masih belum maksimal. Kegiatan pembukuan dan pelaporan juga dikategorikan kurang baik karena banyak usaha perhotelan yang belum terdata dan. Dan tahap yang terakhir yaitu kegiatan pembayaran dan pemungutan/penagihan juga kurang baik dikarenakan kegiatan pembayaran dan pemungutan/ penagihan belum terlaksana dengan optimal. Berdasarkan analisis diatas diharapkan kepada wajib pajak yang menunda pembayaran pajak hotel dan yang tidak membayar pajak hendaknya diberikan sanksi administrasi yang tegas dan penegkan hukumnya agar lebih diterapkan dan dijalankan sesuai dengan perundang-undangan tentang pajak daerah yang berlaku serta berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2011 Tentang pajka hotel.

Kata kunci: pajak Hotel, Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Sistem Penerimaan Pajak Hotel

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12
2.2. Pengertian pajak	14
2.3 Pajak Menurut Pandangan Islam.....	17
2.4. Pajak Daerah	19
2.5. Tolak ukur menilai pajak daerah	21
2.6. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.....	23
2.7. Objek dan Subjek Pajak Hotel	24
2.8. Dasar pengenaan dan tarif pajak hotel	26
2.9. Sistem penerimaan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hilir	26
2.10.Defenisi konsep.....	29
2.11.Konsep Operasional	30
2.12. Teknik Pengukuran	32
2.13. Hipotesis.....	35

2.14. Kerangka berfikir	36
-------------------------------	----

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian	37
3.3. Jenis dan Sumber Data	37
3.4. Populasi dan sampel.....	38
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6. Teknik Analisa Data.....	40

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir	42
4.2. Pemerintahan.....	45
4.3. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah.....	50

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Rokan Hilir.....	56
5.2 Hasil Penelitian	56
5.2.1 Hasil Angket	57
5.3 Pembahasan.....	88

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan	91
6.2. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Nama Hotel, Wisma Serta Penginapan yang ada di Kabupaten Rokan	
Hilir.....		4
Tabel 1.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2007-2011 di Kabupaten Rokan	
Hilir.....		7
Tabel 1.3	Perincian populasi dan sampel.....	39
Tabel 1.4	Kecamatan, Ibukota dan Luas Wilayah di Kabupaten Rokan	
Hilir.....		46
Tabel 5.1	Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan	
Hilir.....		58
Tabel 5.2	Tanggapan Responden Mengenai Wajib Pajak Hotel Yang Tidak Mendaftarkan Usahanya Sudah Ditindaklanjuti Dengan	
Baik.....		59
Tabel 5.3	Tanggapan Responden Mengenai Kegiatan Pencatatan Data	
	Wajib Pajak Hotel Telah Dilakukan Dengan	
Baik.....		60

Tabel 5.4	Tanggapan Responden Mengenai upaya Dinas Pendapatan Dalam Pengumpulan dan Penyusunan Subjek dan Objek Pajak Hotel Rokan Hilir.....	61
Tabel 5.5	Tanggapan Responden Mengenai Prosedur yang Diterapkan Pemerintah dalam Pendaftaran dan Pendataan.....	62
Tabel 5.6	Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Pendaftaran dan Pendataan.....	63
Tabel 5.7	Tanggapan Responden Mengenai Penetapan Pajak Hotel Dilaksanakan Dengan Melihat Pendapatan Pengusaha Hotel Sudah Dilaksanakan Dengan Baik.....	65
Tabel 5.8	Tanggapan Responden Mengenai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Melaksanakan Sosialisasi Tentang Ketetapan Pajak Hotel kepada Wajib Pajak Dengan Baik.....	66
Tabel 5.9	Tanggapan Responden Mengenai Ketetapan Pajak Hotel Yang Telah Dibuat Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	67

Tabel 5.10	Tanggapan Responden Mengenai Ketetapan Pajak Hotel yang Dibayar Sesuai dengan Tarif Yang Telah Ditetapkan Sudah Terlaksana dengan baik.....	68
Tabel 5.11	Tanggapan Resonden Mengenai ketetapan Pajak Hotel sudah Terlaksana dengan baik.....	69
Tabel 5.12	Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Perhitungan dan Penetapan.....	70
Tabel 5.13	Tanggapan Responden Mengenai DISPENDA Kabupaten Rokan Hilir Telah Membuat Pembukuan Tentang Wajib Pajak Hotel yang Terutang Dengan Baik.....	73
Tabel 5.14	Tanggapan Responden Mengenai Pembukuan dan Pelaporan yang Dibuat Berdasarkan Keadaan yang Terjadi Dilapangan yang Disusun Dengan Baik.....	74
Tabel 5.15	Tanggapan Responden Mengenai Wajib Pajak Hotel yang tidak Menyelenggarakan Pembukuan dan Pelaporan Ditindak Lanjuti Dengan Baik.....	75
Tabel 5.16	Tanggapan Responden Mengenai Pelaporan Pembukuan telah	

	Dilaksanakan dengan Baik.....	76
Tabel 5.17	Tanggapan Responden Mengenai Pelaporan yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Hotel Sudah Berjalan dengan Baik.....	77
Tabel 5.18	Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Indikator Pembukuan dan Pelaporan.....	
Tabel 5.19	Tanggapan Responden Mengenai Prosedur dalam Pemungutan Dapat diikuti oleh Wajib Pajak Hotel dengan Baik.....	80
Tabel 5.20	Tanggapan Responden Mengenai Hambatan yang Dialami oleh Petugas Kolektor pada Saat Pemungutan Pajak Dapat di Selesaikan dengan Baik.....	81
Tabel 5.21	Tanggapan Responden Mengenai Pemungutan / Penagihan Yang Dilakukan Oleh DISPENDA Kabupaten Rokan Hilir Sudah Berjalan dengan Baik.....	82
Tabel 5.22	Tanggapan Responden Mengenai Pemungutan Pajak Hotel Dilakukan Kolektor yang Berwenag Terhadap setiap Wajib Pajak Sudah Berjalan dengan Baik.....	83
Tabel 5.23	Tanggapan Responden Mengenai Sistem dan Prosedur yang	

	Ditetapkan Oleh Pemerintah dalam pemungutan pajak	
Dapat	Berjalan dengan	
Baik.....		84
 Tabel 5.24	 Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Pembayaran dan Pemungutan / Penagihan.....	 86
 Tabel 5.25	 Rekapitulasi Keseluruhan Questioner.....	 89

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah telah dicanangkan pemerintah merupakan suatu kesatuan yang utuh dan pembangunan nasional diarahkan guna untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia serta menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia umum nya dan masyarakat daerah khususnya, sehingga daerah dapat tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa dan potensi yang dimilikinya sendiri seiring dengan konsepsi otonomi daerah.

Adapun ketentuan yang mengatur kewenangan daerah terdapat dalam undang-undang Otonomi daerah No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dengan esensi kebijakan otonomi daerah yang dewasa ini telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi nampak nya akan memberikan harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih terlaksana dan terciptanya iklim demokrasi di daerah serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan keinginan pemerintah pusat sebagaimana yang telah terjadi.

Dalam undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan lain nya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. (Haw.Widjaja 2005: 78). Pengelolaan pajak daerah dan

retribusi daerah diatur dengan undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk peraturan daerah.

Penerimaan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penjualan sejumlah output atau dengan kata lain merupakan segala pendapat yang diperoleh perusahaan hasil dari penjualan produksinya.

Diantara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari pendapatan asli daerah (PAD), oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari pendapatan asli daerah perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah dengan cara intensifikasi maupun dengan cara eksentifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan harapan pada pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004 (Marihut. P. Siahaan 2005: 15)

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan piutang
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah
2. Dana perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
4. Pembiayaan yang bersumber dari :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- b. Penerimaan pinjaman daerah
- c. Dana cadangan daerah
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan asli daerah bersumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan salah satu sumber PAD yang dominan setelah retribusi daerah adalah pajak daerah.

Dengan demikian faktor pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang penting untuk membantu lancarnya jalan roda pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Begitu juga daerah kabupaten Rokan Hilir yang merupakan daerah otomomi seperti daerah otonomi lainnya yang ada diindonesia bahwa untuk membiayai pengeluaran daerah baik yang berupa pembiayaan rutin maupun pembangunan yang memerlukan dana yang cukup besar maka dinas pendapatan daerah selaku unsur pelaksanaan daerah dibidang pendapatan daerah diharuskan mampu menggali potensi-potensi pendapatan daerah dan usaha daerah lainnya secara optimal.

Dalam undang-undang No.28 Tahun 2009 menyebutkan ada beberapa pajak yang telah ditentukan dari pemerintah pusat untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, diantara nya:

- 1. Pajak Hotel
- 2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak air tanah
8. Pajak bea perolehan hak atas tanah
9. Pajak parkir
10. Pajak sarang burung walet
11. Pajak bumi dan bangunan

Disini penulis melihat bahwa pajak hotel merupakan salah satu pendapatan Asli Daerah yang potensial jika dikelola dengan baik karena dengan seiring berkembangnya pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir menjadi kota yang berkembang dengan pesat telah banyak hotel-hotel, wisma-wisma serta Penginapan yang berada di kabupaten Rokan Hilir. Berikut ini disajikan daftar Hotel, wisma dan penginapan yang terdata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 1.1 Daftar Nama Hotel, Wisma Serta Penginapan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir

NO	Nama-Nama Hotel	Alamat
1	Hotel Bagan	Jl. Sentosa Bagan Kota, Bagan Siapiapi
2	Hotel Kades	Jl. Sentosa Bagan Kota, Bagan Siapiapi
3	Hotel Lion	Jl. Mawar Bagan Barat
4	Hotel Horizon	Jl. Perdagangan, Bagan Barat, Bagan Siapiapi

5	Hotel Mahera	Jl. Utama Bagan Barat, Bagan Siapiapi
6	Penginapan Mawar	Jl. Utama, Bagan Barat, Bagan Siapiapi
7	Hotel Indah	Jl. Syahbandar, Bagan Barat, Bagan Siapiapi
8	Wisma Megah Go	Jl. Syahbandar, Bagan Barat, Bagan Siapiapi
9	Wisma Rohil	Jl. Pelabuhan Baru, Bagan Barat, Bagan siapiapi
10	Wisma Paradise	Jl. Perwira, Bagan Kota, Bagan Siapiapi
11	Hotel Kesuma	Jl. Manggis No. 22, Bagan Siapiapi
12	Penginapan Dunia Baru	Jl. Pahlawan Bagan Siapiapi
13	Hotel Home Town	Jl. Jendral Sedar, Bagan Kota, Bagan Siapiapi
14	Penginapan Aisyah	Jl. Pahlawan, Bagan Timur
15	Hotel Lucky Star	Jl. Perniagaan, Bagan Barat
16	Wisma Cahaya Baru	Jl. Perniagaan Gg. Bambu Kuning No.103
17	Hotel Grand	Jl. Pelabuhan Baru, Bagan Barat
18	Penginapan Armarosa	Jl. Kecamatan, Bagan Punak
19	Hotel Kent	Jl. Bawal, Bagan Timur
20	Wisma Dragon	Jl. Perdagangan, Bagan Kota
21	Hotel Fauziah	Jl. Jendral. Sudirman, Bagan Batu
22	Losmen Ika Rapi	Jl. Lintias Riau Sumut, Bagan Batu
23	Wisma Skip	Jl. Jendral Sudirman, Bagan Batu
24	Wisma Sejahtera	Jl. Jendral Sudirman, Bagan Batu
25	Hotel Bintang Mulia	Jl. Jendral Sudirman No. 360, Bagan Batu
26	Hotel Suzuya	Jl. Jendral Sudirman, Bagan Batu

27	Wisma Teratai Mas	Jl. Jendral Sudirman, Bagan Batu
28	Hotel Buluh Pagar	Jl. Lintas Riau-Sumut Km.38, Bagan Jaya
29	Wisma Intan	Jl. Bakti, Panipahan
30	Wisma Imel's Agape	Jl. Bakti, Panipahan
31	Wisma Deli	Jl. Lintas Riau Sumut, Banjar XII, Tanah Putih
32	Hotel Permata Sari (RPS)	Jl. Lintas Riau Sumut Km. 165, BXII, Tanah Putih

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, 2012

Dari data di atas kita bisa menyimpulkan bahwa banyak sekali Hotel , Wisma dan penginapan yang ada di kabupaten Rokan Hilir, ini berarti bertambah pula pendapatan daerah dari sektor pajak hotel, Wisma dan penginapan. Jika hal ini dikelola dengan baik dan terus ditingkatkan maka pendapatan daerah akan semakin besar dan akan menambah keuangan daerah kabupaten Rokan Hilir.

Sejak diterbitkan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak Hotel, hal tersebut merupakan upaya pemerintah kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk menggali potensi-potensi sumber penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir termasuk pajak Hotel.

Keseluruhan penerimaan pajak daerah tersebut memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah kabupaten Rokan Hilir yang diarahkan sebagai penggerak roda pemerintah dan pembangunan daerah. selain itu, penerimaan pajak Hotel termasuk pendapatan asli daerah yang dikumpulkan seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Rokan Hilir. Sehingga setiap kecamatan dan instansi akan

memberikan peranan penting dalam penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel dikabupaten Rokan Hilir. Lebih jelas nya bias dilihat tabel berikut ini :

Table 1.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2007- 2011 di Kabupaten Rokan Hilir

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2007	Rp.247,127,439	Rp.192,022,500	77,70 %
2	2008	Rp.247,127,436	Rp.193,887,900	78,46 %
3	2009	Rp.247,127,439	Rp.187,527,100	75,88 %
4	2010	Rp.248,707,436	Rp.171,235,400	68,85 %
5	2011	Rp.248,707,436	Rp.115,357,036	53,62 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, 2012

Dari tabel 1.2 diatas menunjukan bahwa tahun 2007 target yang ditetapkan untuk pajak hotel sebesar Rp. 247.127.439 penerimaan dari sektor pajak hotel yang dapat terealisasi kurang baik yakni sebesar Rp. 192.022.500 atau sebesar (77,70%). dan pada tahun 2008 target yang telah ditetapkan pajak hotel adalah Rp.247.127.436 dan terealisasi sebesar Rp. 193.887.900 atau sebesar (78,46%) mengalami peningkatan, dari tahun sebelum nya. Dan Pada tahun 2009 juga penerimaan pajak hotel juga tidak mencapai target dimana target nya sebesar Rp 247.127. 439 dan hanya terealisasi Rp 187. 527.100 atau sebesar (75,88%) .pada tahun 2010 juga belum terealisasi dengan baik, adapun target nya sebesar Rp 248.707.436 dan realisasi nya Rp 171.235.400 atau sebesar (68,85%). Kemudian pada tahun 2011 penerimaan pajak hotel semakin menurun dimana dengan target Rp 248.707.436 dan realisasinya sebesar Rp 115.357.036 atau sebesar (53,62%).

Dari tahun ketahun penerimaan pajak hotel tidak dapat terealisasi dengan baik dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Dinas pendapatan daerah kabupaten Rokan Hilir merupakan unsur pelaksanaan dan penanggungjawab dalam bidang pengelolaan keuangan daerah kabupaten Rokan Hilir. Salah satu nya adalah mengelola penerimaan pajak hotel, dimana melalui pelaksanaan sistem penerimaan yang harus dilalui tahap demi tahap, sistem tersebut saling berhubungan dan kait mengkait satu sama lain. Penurunan realisasi penerimaan pajak hotel dan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan yang terjadi dikabupaten Rokan Hilir diduga merupakan dari pelaksanaan sistem penerimaan pajak hotel yang di kelola oleh dinas pendapatan daerah kabupaten Rokan Hilir belum berjalan optimal, sehingga unit yang terkait dalam kegiatan penerimaan pajak hotel belum mampu mencapai penerimaan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan tiap tahun. Namun yang menjadi suatu pertimbangan bahwa dalam penerimaan pajak hotel tersebut masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam proses pemungutan pajak hotel yang ada di kabupaten Rokan Hilir diantaranya:

1. Sulitnya ditemukan para wajib pajak Hotel
2. Masih banyak para wajib pajak Hotel yang menunda pembayarannya
3. Kurangnya pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap wajib pajak sehingga masih ada wajib pajak yang tidak membayar pajak hotel.
4. Belum optimalnya sistem kerja pihak Dinas Pendapatan kabupaten Rokan Hilir selaku unsur pelaksanaan dan penanggung jawab dalam pengelolaan bidang keuangan daerah sehingga satuan unit kerja terkait

dengan kegiatan pemungutan pajak hotel belum mampu mencapai penerimaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh dinas pendapatan daerah kabupaten Rokan Hilir.

Dalam kegiatan penerimaan pajak hotel ini biasanya kabupaten Rokan Hilir ini telah menetapkan target sebelumnya dan apakah target yang ditetapkan telah dapat terlaksanakan dan terealisasi dengan baik. dan apakah ada hambatan-hambatan atau tidak adanya hambatan sama sekali. Dari keterangan diatas maka penelitian mengambil sebuah judul “*Analisis penerimaan pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir*”.

1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena penulis temui sehubungan dengan belum optimal nya pencapaian target penerimaan pajak hotel, maka penulis dapat merumuskan permasalahan nya yaitu : “ **Bagaimanakah Pelaksanaan Sistem Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Rokan Hilir ?**”

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis sistem penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian nya yaitu:

1. Memberikan masukan atau informasi pemerintahan kabupaten Rokan Hilir tentang penerimaan pajak hotel
2. Menambahkan pengetahuan bagi penulis sehingga menjadi pengalaman yang bermanfaat

3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial khususnya jurusan Administrasi Negara

1.5. Sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama yang mana dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti pengertian atau definisi konsep, konsep operasional, hipotesis dan kerangka pemikiran

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini Menguraikan tentang jenis penelitian tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi keadaan umum kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Struktur organisasi, Uraian Tugas, Keadaan Pegawai, Serta fasilitas kerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil pengelolaan data lapangan, hasil penelitian Lapangan serta distribusi wawancara tentang sistem penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Rokan Hilir dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hilir

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penting bagi setiap daerah. Selain itu, pendapatan asli daerah merupakan sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan salah satu sumber terpenting pendapatan asli daerah yang dominan setelah retribusi adalah pajak. Hal ini juga tertuang dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang secara jelas mengatakan bahwa pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkatkan sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan .

Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan, terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (yuswar zainul 2005:90).

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu wujud dari desentralisasi fiskal, untuk memberikan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya. (Adrian sutedi, 2008: 14).

Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut juga sebagai PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipunggut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (undang-undang otonomi Daerah Tahun 2004)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Adapun Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir itu sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi. Beberapa jenis pajak yang ada di kabupaten Rokan Hilir yaitu:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak air tanah
8. Pajak bea perolehan hak atas tanah
9. Pajak parkir
10. Pajak sarang burung walet
11. Pajak bumi dan bangunan

Dengan demikian, pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan

indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah dibidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintahan daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.2. Pengertian pajak

Dalam Gusfahmi (2007:27) secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah Dharibah yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, dan membebaskan.

Menurut Yusuf Qardhawi pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh Negara. (Gusfahmi, 2007 : 31)

Menurut pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, (Mba. Mardiasmo, 2008:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum .

Menurut Fidel (2010:4), pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang, atas penghasilan nya tersebut, maka sebagiannya wajib diberikan kepada Negara tanpa mendapat kontraprestasi.

Adapun menurut P.J.A Adriani, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Fidel, 2010:4).

Dalam Marihot p. Siahaan (2005:7) pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontraprestasi atau balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Sumitro (Mardiasmo, 2004: 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dengan penjelasan sebagai berikut :

Dapat dipaksakan artinya: bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita dan juga penyanderaan, terhadap pembayar, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu, seperti halnya retribusi.

Berdasarkan undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan dan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa

penetapan beban kepada rakyat, seperti pajak dan retribusi daerah harus ditetapkan berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pungutan pajak dan retribusi daerah harus berdasarkan undang-undang.

Menurut (Waluyo 2011: 23) pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut prof. Dr. MJH Smeets (Sudarsono 2000: 1) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang menurut norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang ditujukan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dari disertasinya yang berjudul pajak berdasarkan azas gotong royong menyatakan pajak adalah iuran wajib yang berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Waluyo 2007: 3).

Sedangkan Menurut *Mr. Dr. Nj. Feldmann* dalam buku *de overheidsmiddelen van Indonesia* (terjemahan) pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (Menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Waluyo, 2007:2)

Dalam Erly Suandy (2008: 4) pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik.

Dalam Rochmat soemitro, (2004:8) pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya secara langsung dapat ditunjuk. Peralihan kekayaan demikian itu, dalam kata sehari-hari, hanya dapat berupa penggarongan, perampasan, pencopetan (dengan paksa), atau pemberian hadiah dengan sukarela dan ikhlas (tanpa paksaan).

2.3 Pajak Menurut Pandangan Islam

Pajak dalam pandangan islam sebagai mana dalam firman allah dalam surat At-Taubah ayat 29

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Pajak dalam islam disebut dengan jizyah yaitu per kepala yang dipungut oleh per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Jizyah pungutan dapat dipaksakan dimana dalam ayat diatas oleh diperangi bagi yang tidak mau

membayar jizrah. Sebagaimana pajak dapat dipaksakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika pajak dipungut menurut secara islam bagi yang enggan membayar pajak dapat ditagih secara paksa, sita dan bahkan boleh diperangi sehingga wajib pajak tersebut tunduk terhadap aturan yang telah di keluarkan.

Berdasar kan defenisi pajak, maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut :

1. pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan kekuatan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah berdasarkan jenis pajak yang dipungut.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak).
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari Negara ke pada pembayar pajak.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak
6. Pajak memiliki sifat yang dapat dipaksakan. Arti nya wajib membayar pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4. Pajak Daerah

Dalam Marihot p. Siahaan (2005:10) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah .

Pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutan nya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaan nya yang guna nya untuk membiayai pengeluaran daerah berhubungan dengan tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga nya sendiri dalam ikatan NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (afrizal, 2009:48).

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Adrian Sutedi, 2008: 6).

Menurut Yasin Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik, dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah.(Adrian Sutedi, 2008: 57)

Pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Finansial (Budgeter)

Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja Negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat.

Dengan demikian, fungsi finansialnya yaitu pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah (apa lagi untuk saat ini, pajak sumber dana bagi pemerintah yang paling utama, dikarenakan mulai berkurang nya sumber dana lain nya yang dimiliki pemerintah, misal nya: minyak dan gas bumi) guna mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan Negara.

2. Fungsi mengatur (Regulerend)

Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan interpretasi yang berbeda, antara fiskus dan wajib pajak. (Fidel, 2010: 6)

Jika dilihat dari konsep pajak, maka pajak biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Sementara itu, dapat dilihat pada pasal 2 ayat 4 undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa dengan peraturan daerah dapat diterapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan dalam (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. bersifat pajak dan bukan retribusi
2. objek pajak terletak atau terdapat diwilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
3. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
4. objek pajak bukan merupakan objek propinsi dan atau objek pajak pusat
5. potensinya memadai
6. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
7. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
8. menjaga kelestarian lingkungan.

2.5. Tolak ukur menilai pajak daerah

Dalam penerimaan pajak daerah agar sesuai dengan makna pelaksanaan otonomi daerah, pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan kepada sektor pajak yang bersangkutan. Memberikan penilaian terhadap keberhasilan atau pajak mutlak untuk dilakukan, karena tolak ukur ini cukup berguna sebagai alat ukur untuk menilai baik dan tidaknya pajak daerah yang ada dan pajak daerah yang diusulkan. menurut Tjip (Haula Rosdiana, 2012: 65) ada 5 tolak ukur untuk menilai pajak daerah yaitu sebagai berikut :

1. Hasil : memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, yakni stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi

penduduk dan sebagainya. Juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

2. Keadilan : dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang ada, pajak haruslah adil secara horizontal dan vertikal. Pajak haruslah adil dari tempat ketempat, dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari suatu daerah kedaerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.
3. Daya guna ekonomi : pajak hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau menabung, dan memperkecil “Beban Lebih” pajak.
4. Kemampuan melaksanakan: suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemampuan tata usaha.
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah: haruslah jelas kepada daerah maka suatu pajak harus dibayarkan dan tempat akhir pajak. Pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah kedaerah lain. Dari segi potensi ekonominya, pemungutan pajak daerah juga hendaknya tidak mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah.

Selanjut nya berhubungan dengan tolak ukur untuk menilai pajak daerah atas Musgrave (Waluyo, 2007:13) kemudian mengemukakan suatu sistem pajak yang baik haruslah memenuhi kriteria antara lain:

1. Benefit principle dalam sistem perajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat dan dinikmatinya dari pemerintah.
2. Ability principle, dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar.

With holding sistem, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya yang terutang oleh wajib pajak.

2.6. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. (peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel).

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan

dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran (Marihot p.Siahaan 2005: 246).

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel (Marihot p. Siahaan 2005:245). Pengertian pajak hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada.

Adapun dikabupaten Rokan Hilir membentuk peraturan daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengeluarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang pajak hotel.

2.7. Objek dan Subjek Pajak Hotel

Menurut peraturan daerah No.7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, Bab II pasal 3 ayat 1, objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

Dalam Marihot p. Siahaan, (2005:247) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana dibawah ini:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata, wisma pariwisata, losmen, dan rumah penginapan.

2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifat nya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel.

Sedangkan bukan objek pajak hotel yang dimaksud pada ayat (1) menurut peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir No.7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, Bab II pasal 3 ayat 3 adalah:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintahan atau peraturan daerah
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
3. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
4. Jasa tempat tinggal rumah sakit, asrama perawatan, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenisnya, dan
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Sedangkan subjek pajak hotel menurut peraturan daerah No.7 Tahun 2011 Tentang pajak hotel, Bab II pasal 4, bahwa subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek pajak hotel yaitu konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh

pengusaha hotel. Dan yang menjadi wajib pajak hotel yaitu pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Jadi subjek pajak hotel dan wajib pajak itu tidak sama.

2.8. Dasar pengenaan dan tarif pajak hotel

Dalam Marahot p. siahaan, (2005:249) Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel.

Dalam Marihot p. siahaan, (2005:249) pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian atas jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

Sedangkan menurut peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 7 Tahun 2011 Bab III, pasal 6 tentang pajak hotel dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Dan pasal 7 menyebutkan bahwa tarif pajak hotel yang ditetapkan sebesar 10%.

2.9. Sistem penerimaan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hilir

Menurut johnson, ketzs dan Rosenzweig (dalam Harsono, 2011:3) Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Penerimaan daerah adalah

uang yang masuk ke kas daerah (Afrizal, 2009: 47). adapun sistem penerimaan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hilir adalah :

1. Pendaftaran dan pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan , berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya , petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak, dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

2. Perhitungan dan penetapan

Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan sistem self assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3. Pembukuan dan pelaporan

Wajib pajak hotel dengan peredaran usahanya, Wajib menyelenggarakan pembukuan yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan, harga jual. Pembukuan adalah suatu proses penetapan yang dilakukan

secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.

4. Pembayaran dan pemungutan/penagihan pajak hotel

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kesiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain membentuk kolektor dengan menerbit SK kolektor dalam hal pemungutan tersebut.

Tetapi harus ingat bahwa untuk terkoordinasinya penerimaan pajak hotel sangat diperlukan suatu organisasi yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir karena diketahui aktivitas yang dapat berjalan dengan lancar tanpa ada nya organisasi dan organisasi merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Apa bila dikaitkan dengan peranan didinas pendapatan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan pajak daerah yang meliputi fungsi pemungutan, koordinasi, dan pembinaan teknis dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah bahwa rangkaian pengelolaan organisasi akan menjadi fungsi keberhasilan tujuan yang diinginkan.

Sehubungan dengan penerimaan pajak daerah, yang salah satu nya adalah pajak hotel yang telah ditetapkan paling tinggi 10% dan nilai atas pelayanan nya, atas wajib pajak yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan ketentuan berdasarkan peraturan daerah nomor 7 Tahun 2011, maka keberhasilan

pencapaian target tidak terletak ditangan kepala Dinas Pendapatan tetapi melainkan rangkaian kerja dan seluruh unit kerja yang ada diDinas Pendapatan dengan melaksanakan sistem kerja yang sudah disusun secara optimal.

2.12.Defenisi konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu social (Masri Singarimbun 2005: 33).

Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yang akan diteliti yaitu:

1. Pendaftaran dan pendataan merupakan kegiatan turun kelapangan untuk mengumpulkan data mengenai jumlah nilai pelayanan pajak hotel untuk memenuhi tujuan yang akan dicapai.
2. Perhitungan dan penetapan pajak merupakan kegiatan dimana pengusaha hotel mendaftarkan usaha nya wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel nya.
3. Pembukuan dan pelaporan merupakan kegiatan dimana pencatan data-data tentang pajak hotel dikabupaten rokan hilir sebagai pedoman untuk membuat realisasi penerimaan pajak hotel dikabupaten Rokan Hilir
4. Pembayaran dan penagihan/pemungutan merupakan kegiatan penarikan iuran pajak hotel yang ada dikabupaten Rokan Hilir.(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011).

2.13. Konsep Operasional

Menurut Masri singarimbun (2005; 46) Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Untuk membangun kesamaan persepsi dan pengertian serta menghindari salah pengertian terhadap istilah yang digunakan pada judul ini, maka dapat dioperasionalkan beberapa konsep yang bersifat membatasi.

1. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat , berdasarkan perda Nomor 7 Tahun 2011.
2. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan atau istirahatatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
3. Penerimaan merupakan kegiatan penerimaan pajak hotel yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
4. Pendaftaran dan pendataan merupakan kegiatan turun lapangan untuk mengumpulkan data mengenai jumlah nilai pelayanan pajak hotel untuk memenuhi tujuan yang akan dicapai.

5. Perhitungan dan penetapan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pihak dinas pendapatan untuk menetapkan target penerimaan pajak.
6. Pembukuan dan pelaporan merupakan kegiatan dimana pencatatan data-data tentang pajak hotel dikabupaten Rokan Hilir sebagai pedoman untuk membuat realisasi penerimaan pajak hotel dikabupaten Rokan Hilir.
7. Dinas pendapatan adalah suatu instansi pemerintahan sekaligus unsur pelaksanaan daerah dibidang pendapatan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah termasuk kegiatan pemungutan pajak hotel

Adapun indikator dalam penelitian ini peneliti mengambil dari Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No.7 Tahun 2011 tentang pajak hotel yaitu diantaranya:

1. Pendaftaran dan pendataan
merupakan kegiatan turun kelapangan untuk mengumpulkan data mengenai jumlah nilai pelayanan pajak hotel untuk memenuhi tujuan yang akan dicapai.
2. Perhitungan dan penetapan pajak
merupakan kegiatan diaman pengusaha hotel mendaftarkan usaha nya wajib membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel nya.
3. Pembukuan dan pelaporan
merupakan kegiatan dimana pencatan data-data tentang pajak hotel dikabupaten rokan hilir sebagai pedoman untuk membuat realisasi penerimaan pajak hotel dikabupaten Rokan Hilir

4. Pembayaran dan penagihan/pemungutan

merupakan kegiatan penarikan iuran pajak hotel yang ada dikabupaten Rokan Hilir.

Untuk menjaga agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka penulisan menetapkan konsep operasional yang digunakan untuk mengukur indikator penelitian dengan menggunakan **skala likert**. Dimana variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut menjadi titik tolak ukur menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan. (sugiono, 2007 : 107). Jawaban setiap instrument mempunyai gradasi dari positif hingga negatif yaitu berupa :

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Cukup baik
- d. Kurang baik
- e. Tidak baik

2.12. Teknik Pengukuran

Indikator yang diukur adalah :

1. Pendaftaran dan pendataan Meliputi: kegiatan turun kelapangan untuk mengumpulkan data mengenai jumlah nilai pelayanan pajak hotel dalam pemenuhan target yang telah ditetapkan

Indikator pendaftaran dan pendataan dikatakan

- a. Sangat baik : Apabila pendaftaran dan pendataan telah sesuai dengan nilai pelayanan pajak hotel dalam pemenuhan target yang telah ditetapkan

- b. Baik : Apabila pendaftaran dan pendataan hanya dapat dalam pemenuhan target yang ditetapkan
 - c. Cukup baik : Apabila pendaftaran dan pendataan hanya dapat dalam pengumpulan data dan pendaftaran
 - d. Kurang baik : Apabila pendaftaran dan pendataan kurang dapat memenuhi pendaftaran dan pendataan yang ditargetkan
 - e. Tidak baik : Apabila pendaftaran dan pendataan sama sekali tidak dapat memenuhi pendaftaran dan pendataan yang ditargetkan
2. Perhitungan dan penetapan pajak meliputi: kegiatan dimana pengusaha hotel mendaftarkan usaha nya wajib membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel nya
- indikator perhitungan dan penetapan pajak dikatakan:
- a. Sangat baik : apabila pengusaha hotel melaporkan kewajiban pajak hotel nya tepat pada waktu dan menepati prosedur yang telah ditetapkan
 - b. Baik : apabila pengusaha hotel melaporkan kewajiban pajak hotel nya tepat pada waktu yang telah ditetapkan
 - c. Cukup baik : apabila pengusaha hotel hanya melaporkan kewajiban pajak hotel nya
 - d. Kurang baik : apabila pengusaha hotel tidak melaporkan kewajiban pajak hotelnya dan tidak membayar apa yang menjadi kewajibannya.
 - e. Tidak baik : apabila pengusaha hotel tidak melaporkan kewajiban pajak hotelnya dan sama sekali tidak pernah membayar apa yang menjadi kewajibannya.

3. Pembukuan dan pelaporan meliputi : kegiatan dimana pencatan data-data tentang pajak hotel dikabupaten rokan hilir sebagai pedoman untuk membuat realisasi penerimaan pajak hotel dikabupaten Rokan Hilir

Indikator pembukuan dan pelaporan dikatakan:

- a. Sangat baik : apabila data-data tentang pajak hotel dan pedoman dalam penerimaan pajak hotel telah terrealisai dan dan tercatat dengan lengkap
- b. Baik : apabila data-data tentang pajak hotel dan penerimaan pajak hotel tercatat dengan lengkap
- c. Cukup baik : apabila data-data tentang pajak hotel dan penerimaan pajak hanya sebagai data pelengkap pembukauan
- d. Kurang baik : apabila data-data tentang pajak hotel dan penerimaan pajak hotel tidak terdata dalam pembukuan sama sekali
- e. Tidak Baik : apabila data-data tentang pajak hotel dan penerimaan pajak hotel sama sekali tidak pernah terdata dalam pembukuan .

4. Pembayaran dan penagihan/pemungutan meliputi : kegiatan penarikan iuran pajak hotel yang ada dikabupaten Rokan Hilir.

Indikator pembayaran dan penagihan/ pemugutan dikatakan:

- a. Sangat baik : apabila pembayaran dan penagihan/pemungutan pajak hotel telah terealisasi dan sesuai dengan target yang ditetapkan kepada wajib pajak hotel.
- b. Baik : apabila pembayaran dan penagihan/pemungutan pajak hotel sebagian besar wajib pajak hotel telah mebayar apa yang diwajibkan kepada wajib pajak hotel

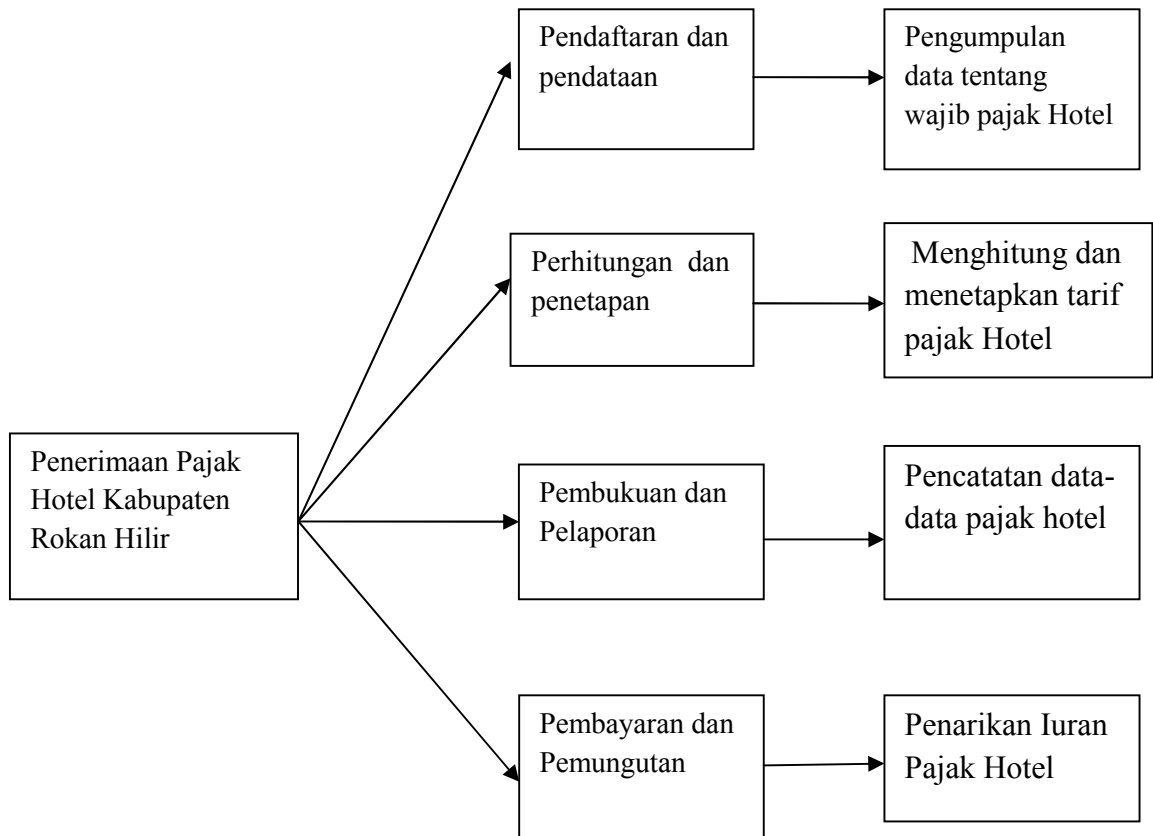
- c. Cukup baik : apabila pembayaran dan penagihan/pemungutan wajib pajak hanya sebagian kecil wajib pajak telah membayar apa yang telah diwajibkan kepada wajib pajak hotel
- d. Kurang baik : apabila pembayaran dan penagihan/pemungutan wajib pajak tidak membayar apa yang telah diwajibkan kepada wajib pajak hotel.
- e. Tidak baik : apabila pembayaran dan penagihan atau pemungutan wajib pajak sama sekali tidak pernah membayar apa yang telah diwajibkan kepada wajib pajak hotel

2.13. Hipotesis

Dari perumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut ***“Di duga penerimaan pajak hotel pada dinas pendapatan daerah kabupaten Rokan Hilir belum optimal disebabkan oleh sistem dan prosedur yang belum baik”.***

2.14. Kerangka berpikir

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan responden sebagai sumber informasi utama yang dibutuhkan untuk menganalisis keberadaan variabel penelitian. Data yang dikumpulkan dari responden penelitian dipergunakan sebagai acuan untuk menganalisis variabel penelitian pada objek atau lembaga yang diteliti. Bertitik tolak dari penjelasan diatas maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variable-variabel yang ada dalam penelitian ini.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi maka penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini karena organisasi ini merupakan organisasi yang mengurus pengelolaan dan penerimaan pajak, termasuk juga pajak hotel. sedangkan penelitian ini dilaksanakan dari bulan September sampai awal tahun 2013.

3.3. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari responden penelitian lapangan mencakup :
 - a. Sistem penerimaan pajak hotel yaitu :
 1. Pendaftaran dan pendataan

2. Perhitungan dan penetapan
3. Pembukuan dan pelaporan
4. Pembayaran dan pemungutan/penagihan
- b. Hambatan dalam pelaksanaan sistem penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
- c. Staf-staf pegawai yang terkait dengan penerimaan pajak hotel
2. Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari pihak kedua guna melengkapi penelitian ini meliputi :
 - a. Sejarah singkat kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
 - b. Tugas pokok, kedudukan dan fungsi kantor Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Rokan Hilir
 - c. Susunan organisasi dan uraian tugas
 - d. Keadaan pegawai dan fasilitas kerja pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
 - e. Struktur organisasi kantor Dinas pendapatan Daerah Kabupetan Rokan Hilir
 - f. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan Retribusi daerah
 - g. Perda Kabupaten Rokan Hilir No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

3.4. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik suatu kesimpulannya (sugiyono, 2007:90). Adapun

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dinas pendapatan daerah kabupaten Rokan Hilir dan key informannya pemilik usaha perhotelan di Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 20 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (sugiyono, 2007:91). Adapun pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sensus sampling atau istilah lain nya sampel jenuh (sugiyono,2007: 96) dimana keseluruhan populasi dijadikan sampel yaitu berjumlah 20 orang. Karena mengingat populasi nya relatif sedikit, maka dalam penelitian ini seluruh populasi dijadikan sampel. Adapun jumlah pegawai dinas pendapatan adalah 16 orang dan key informannya dari pengusaha Hotel yang ada di Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 4 orang.

Tabel 3.1 Perincian populasi dan sampel

Sub populasi	Populasi	Sampel
Pegawai Dinas Pendapatan	16	16
Key informan dari Pengusaha Hotel	4	4
Jumlah	20	20

Sumber : Data olahan tahun 2012

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi adalah kegiatan pengamatan langsung kelapangan terhadap objek peneliti yang ada dalam rangka untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat mengenai pemungutan dan penerimaan pajak hotel.
2. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan terpimpin terhadap sebagian responden yang dianggap perlu dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan.
3. Angket/kuesioner adalah kegiatan Dimana penulis akan memberikan lembaran pernyataan berserta pilihan jawabannya kepada responden berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini .

3.6. Teknik Analisa Data

Untuk mengetahui penerimaan pajak hotel oleh Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, penulis menggunakan metode Deskriptif yaitu data yang dikumpulkan dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interprestasi teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interprestasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai presentase, disajikan dalam bentuk Tabel dan uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus, sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Ferkuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan penerimaan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dari keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Suhairimi Ari Kunto (2003:171), sebagai berikut:

Baik / Optimal : 67-100 %

Kurang Baik / Kurang Optimal : 34-66 %

Tidak Baik / Tidak Optimal : 0-33 %

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik dari penerimaan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibukotanya terletak di Bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota, tepatnya di jalan Merdeka No 58.

Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera, dengan luas wilayah 8.881,59 KM², terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis, sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Utara, dan sebelah Timur dengan Kota Dumai.

Wilayah Rokan Hilir dialiri beberapa sungai. Berdasarkan data yang ada di daerah ini terdapat 16 batang jalur sungai. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten ini umumnya menjadi sarana lalu lintas, dapat dilayari perahu, perahu motor (pompong) kapal motor. Penyelusuran aliran sungai ini dapat dilayari sampai ke hulu sungai Rokan. Adapun sungai-sungai tersebut adalah, Sungai Rokan, Sungai Duku, Sungai Ular, Sungai Tengger, Sungai Siandun, Sungai Daun, Sungai Agas, Sungai Bangko, dan sebagainya. Dari sekian banyak sungai tersebut yang paling penting sebagai sarana perhubungan adalah Sungai Rokan, yang pajangnya sekitar 350 KM.

Seperti layaknya daerah yang ada di Provinsi Riau yang letaknya di tengah-tengah pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Secara geografis terletak Kabupaten Rokan Hilir di garis khatulistiwa beriklim tropis dan mempunyai curah hujan yang tinggi. Berdasarkan data tahun 2008 curah hujan di Kabupaten Rokan Hilir mencapai 215,3 mm/tahun dengan temperatur antara $26^0 - 32^0$. Berdasarkan data yang ada menunjukkan hampir 52 rata-rata pada tahun 2008. Melihat keadaan ini berarti musim kering di daerah ini lebih panjang daripada musim penghujan. Musim kering hampir terjadi rata-rata dalam satu tahun mencapai tujuh bulan sedangkan musim penghujan hanya 5 bulan.

Curah hujan di kabupaten Rokan Hilir terjadi pada bulan Januari mencapai 360.29 mm, kemudian akhir Januari menjelang Februari dapat mencapai 405.59 mm dan pada bulan Oktober – November mencapai 357.69 mm. Pada bulan-bulan lainnya kurang dari 300 mm dan di atas 100 mm. Keadaan ini menjadi perhitungan tersendiri bagi petani dan nelayan.

Topografi Kabupaten Rokan Hilir ini terdiri dari daerah dataran rendah dan sebagian lagi dataran tinggi. Daerah yang datarannya rendah adalah sebelah utara, daerah ini terdiri dari rawa-rawa dan merupakan pembentukan delta. Sedangkan wilayah selatan merupakan daerah dataran tinggi. Kemudian daerah Kabupaten Rokan Hilir, selain mempunyai daerah datar juga terdiri dari daerah pesisir dan pulau. Pulau-pulau yang ada di Kabupaten Rokan Hilir menyebar di beberapa kecamatan yaitu: Kecamatan Kubu terdapat Pulau Halang, Pulau Jemur di Pasir Limau Kapas, Pulau Berkey, Pulau Pedamaran di Kecamatan Bangko, dan Pulau Sinaboi di Kecamatan Sinaboi.

Kabupaten Rokan Hilir mempunyai banyak sungai di antara sungai-sungai yang ada tersebut, sungai yang paling terkenal adalah Sungai Rokan. Panjang Sungai Rokan mencapai lebih kurang 350 kilometer, sungai ini dapat dilayari sampai ke hulu. Artinya sungai ini pada masa lalu selain sebagai sarana transportasi juga digunakan oleh masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sebagai penuhan kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci bahan menjadi tumpuan ekonomi masyarakat seperti untuk mencari biota air (ikan, ketam, dan lain-lain)

Sungai Rokan bagi masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir sudah tidak asing lagi. Ia merupakan sumber aspirasi dan sumber kehidupan masyarakat di sekitarnya. Keadaan muara Sungai Rokan terjadi pendangkalan, karena adanya erosi di daerah hulu yang mengakibatkan terbentuknya delta. Lebar Sungai Rokan hanya tinggal beberapa meter saja. Sungai bagi masyarakat Melayu adalah mempunyai beberapa peranan, seperti sebagai sarana transportasi (jalan raya sebelum adanya jalan darat) untuk menghubungkan satu kawasan pemukiman yang satu dengan yang lain, sumber kehidupan, tempat untuk bermain. Peranan yang sangat penting yaitu pengembangan teknologi lokal seperti pembuatan alat transportasi, penangkapan ikan dan sebagai tempat untuk berinovasi dan kreativitas anak-anak yang tinggal di bantaran sungai tersebut. Jika Sungai Rokan hilang maka hilanglah kata, bahasa, tradisi, adat dan budaya. Artinya potensi yang bersumber dari air yang bernama Sungai Rokan sudah hilang di Bumi Negeri Seribu Qubah. Oleh karena itu, agar identitas, jati diri serta potensi dari Sungai Rokan terus berkembang, jaga keberadaan sungai tersebut, melalui pelestarian

hutan dan bandar di daerah hulu. Jika hulu rusak, maka hilir juga rusak. Apabila hulu baik, maka hilir juga akan baik. Untuk itu, pemimpin daerah yang berada di daerah aliran sungai (DAS), perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Agar kekayaan hari ini juga dinikmati oleh generasi berikutnya.

4.2. Pemerintahan

Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999. Berdasarkan UU ini ibukotanya adalah di Ujung Tanjung. Namun aspirasi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menghendaki agar ibukota ditetapkan di Bagan Siapi-api. Hal ini berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti untuk menjangkau daerah-daerah pesisir, menghidupan kembali Kota Bagan Siapi-api sebagai kota sejarah, yang pernah menjadi Ibukota Propinsi Bangko semasa kerajaan Siak Sri Indrapura, Bagan Siapi-api sebagai kota penghasil ikan dunia pada masa lalu. Berdasarkan berbagai alasan itu, maka kota di Bagan Siapi-api ditunjuk sebagai ibu kota Kabupaten. Alasan lain adalah sarana dan prasarana di Kota Bagan sudah memadai bila dibandingkan di daerah lain.

Pada awal berdiri Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari lima kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Tanah Putih,
2. Kecamatan Kubu,
3. Kecamatan Bagan Sinembah,
4. Kecamatan Bangko dan
5. Kecamatan Rimba Melintang.

Lima kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini terbagi dalam 7 kelurahan, 71 desa dan 11 desa persiapan. Pada saat itu, tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir adalah 1 desa swadaya, 9 desa swakarya, 68 desa swasembada dan 11 desa persiapan. Setelah hampir dua belas tahun berdiri Kabupaten Rokan Hilir, telah dibentuk 14 Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Kecamatan, Ibukota Kecamatan dan Luas Wilayah di Kabupaten Rokan Hilir

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1. TANAH PUTIH	SEDINGINAN	1,915.23	21.56
2. P U J U D	P U J U D	984.90	11.09
3. TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN	MELAYU BESAR	198.39	
4. RANTAU KOPAR	RANTAU KOPAR	231.13	2.60
5. BAGAN SINEMBAH	BAGAN BATU	847.35	9.54
6. SIMPANG KANAN	SIMPANG KANAN	445.55	5.02
7. K U B U	TELUK MERBAU	1,061.06	11.95
8. PASIR LIMAU KAPAS	PANIPAHAN	669.63	7.54
9. BANGKO	BAGANSIAPAPI	475.26	5.35
10. SINABOI	SINABOI	335.48	3.78
11. BATU HAMPAR	BANTAYAN	284.31	3.20
12. PEKAITAN	PEDAMARAN	465.30	5.24
13. RIMBA MELINTANG	RIMBA MELINTANG	235.48	2.65
14. BANGKO PUSAKO	BANGKO KANAN	732.52	8.25
KABUPATEN ROKAN HILIR	BAGANSIAPAPI	8,881.59	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, 2012

Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah kabupaten yang terbaru, secara administrasi telah menyusun organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan pemerintah No.41 Tahun 2007 organisasi perangkat daerah dibentuk sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pada tahun 2011 usia Kabupaten Rokan Hilir memasuki tahun yang ke 12 (kedua belas tahun). Pada tahun ini juga periodisasi dari pemerintahan secara otonom telah

memasuki tahap ke II (tahun ke enam). Untuk itu pemerintah Rokan Hilir menyusun rancangan pembangunan jangka menengah tahun ke enam periodisasi kedua. Rancangan pembangunan jangka menengah ini merupakan pedoman bagi organisasi perangkat daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah untuk setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah menyusun 33 (tiga puluh tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD= Organisasi Perangkat Daerah). Salah satu dari 33 SKPD adalah Dinas Penapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Sumberdaya aparat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan data yang tersedia dari BPS berjumlah 4.267, yang tersebar pada 42 Dinas, Instansi dan kantor. Apabila dilihat dari jenjang pendidikannya sebagian besar adalah berpendidikan diploma dan sekolah menengah. Untuk aparatur yang berpendidikan sarjana (Strata dua dan Strata satu) hanya 19.40 %. Keadaan ini memberikan gambaran bahwa masih diperlukan peningkatan kualitas pendidikan bagi aparat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Terutama untuk pendidikan formal yang mengarah pada aparatur pemikir untuk merancang pengembangan Kabupaten Rokan Hilir yang sesuai dengan Visi dan Misi pemerintah Rokan Hilir.

Aparatur Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang berpendidikan Strata dua tersebar pada 25 dinas, instansi dan kantor. Sumberdaya aparat yang berpendidikan S2 yang terbanyak adalah Pada Dinas Pendidikan yaitu sebanyak 14 orang, sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Bappeda, Disperindag. Dinas, Instansi dan Kantor lainnya hanya dua dan ada yang tidak ada sama sekali

aparaturnya yang berpendidikan S2. Untuk aparatur yang berpendidikan sarjana strat satu sudah tersebar di seluruh dinas instansi dan kantor. Namun demikian, yang diperlukan adalah untuk peningkatan sumber daya aparat yang masih berpendidikan diploma dan menengah untuk diberikan motivasi untuk terus mengembangkan dirinya, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Agar sumberdaya aparat Rokan Hilir tidak tertinggal dengan sumberdaya aparat lain di Propinsi Riau. Kesemuannya ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, sehingga Rokan Hilir Maju, sejahtera dan berdaya saing dapat tercapai.

Pembentukan dinas ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor, 11,12 dan 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Dinas Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2007, Bab XIII pasal 53 – 57. Sebagai instansi daerah, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) bertugas untuk melayani masyarakat, bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati Rokan Hilir. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan pelayanan sejalan dengan kedudukan, tugas fungsi (TUPOKSI) yang berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2007. Bab. XIII pasal 53 – 57, yaitu organisasi perangkat daerah sebagai pelayan. Oleh karena itu, pelayanan itu dapat memenuhi persyaratan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, sesuai dengan standar yang ditentukan. Apabila memungkinkan dapat melebihi apa yang ditetapkan

(pelayanan prima = *service excellence*) sebagai pelaksana penerima mandat dari Bupati yang berasal dari masyarakat. Pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan kaidah transparansi, partisipasi, akuntabilitas. Untuk pencapaian pelayanan yang prima dan peningkatan kinerja, Dinas Pendapatan Daerah, perlu menyusun rencana agar memenuhi sendi-sendi tata laksana pelayanan umum seperti:

1. Kesederhanaan;
2. Kejelasan;
3. Kepastian;
4. Keamanan;
5. Kerterbukaan;
6. Efisiensi;
7. Efektivitas;
8. Ekonomis;
9. Keadilan.

Sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan sendi tata laksana pelayanan umum yang berpedoman pada TUPOKSI. Upaya peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban untuk menyusun dan merumuskan Rencana Strategi (Renstra).

Adapun Visi Misi yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan untuk tahun 2011-2016 dalam menjalankan tugas nya yaitu:

VISI:

“Terwujudnya intitusi modern dalam pengelolaan dan peningkatan penerimaan pendapatan daerah serta penggalian sumber-sumber pendapatan daerah berwawasan lingkungan pada Tahun 2016”.

MISI:

1. Melakukan peningkatan: Intensifikasi, Eksitensifikasi, Eksploitasi, penggalian sumber-sumber penerimaan atau pendapatan-pendapatan daerah.
2. Melakukan peningkatan perumusan dan penyusunan rencana kerja penggalian potensi penerimaan yang sah dan penerimaan pendapatan daerah.
3. Peningkatan sarana dan prasarana sebagai usaha untuk peningkatan penggalian dan penerimaan daerah.
4. Peningkatan kerjasama kepada intansi dan lembaga lain, untuk peningkatan penggalian penerimaan pendapatan daerah (Komunikasi, Koordinasi, Sinkronisasi) unit kerja internal dan eksternal.

4.3. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah**1. KEPALA DINAS**

Kepala Dinas Mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Tugas dan fungsi Dinas Pendapatan
- b. Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan dibidang pendapatan daerah
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dberikan kepala daerah

2. SEKTARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris selaku kepala sekretariat, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan urusan umum kepegawaian, keuangan dan perencanaan program. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh sub bidang kesekretariatan. Antara lain ;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bidang Umum dan Kepegawaian bertugas membantu sekretaris dalam melaksanakan dan merumuskan kebijakan urusan umum dan kepegawaian.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bidang Keuangan bertugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan urusan keuangan dalam melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan pengendalian serta pengawasan penyelenggaraan keuangan dalam kegiatan nya.

c. Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bidang Perencanaan Program bertugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan urusan perencanaan dan program dalam melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan merumuskan pedoman/petunjuk teknis serta pemutakhiran pengumpulan dan pengolahan data informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana dan program untuk penerimaan pendapatan daerah dan, penggalan potensi daerah.

3. BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH

Bidang Pendapatan Asli Daerah bertugas membantu Kepala Dinas dalam bidang melaksanakan penyiapan perumusan melaksanakan kebijakan dibidang pendapatan asli daerah (penerimaan penyiapan bahan penyusunan penerimaan, laporan kegiatan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap kegiatan penerimaan pendapatan daerah) dibantu oleh:

a. Seksi Pendapatan Pajak dan Retribusi

Seksi Pendapatan Pajak dan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan yang berhubungan dengan pajak dan retribusi dalam proses pendataan serta penyusunan petunjuk teknis tentang pajak dan retribusi.

b. Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi

Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan tentang perhitungan pajak dan retribusi serta melakukan penetapan perhitungan besaran pajak dan retribusi.

c. Seksi Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Seksi Pemeriksaan Pajak dan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pemeriksaan, penerbitan, dan pendistribusian tentang pajak dan retribusi yang berkaitan.

4. BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN

Bidang Penagihan dan pembukuan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakn dibidang penagihan dan pembukuan.

a. Seksi Penagihan dan Perhitungan

Seksi Penagihan dan perhitungan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan melakukan penagihan dan perhitungan.

b. Seksi Pembukuan dan penerimaan

Seksi Pembukuan dan penerimaan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan denagan pembukuan dan verifikasi.

c. Seksi Pelaporan

Seksi Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam membuat laporan dari data-data pembukuan dan realisasi penerimaan secara periodik.

5. BIDANG PERENCANAAN PENDAPATAN

Bidang perencanaan pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan dibidang perencanaan pendapatan.

a. Seksi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Seksi peningkatan pendapatan asli daerah dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merencanakan dan melakukan langkah-langkah intensifikasi (peningkatan) hasil pemungutan pendapatan daerah.

b. Seksi Pengembangan Pendapatan

Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisa serta mengevaluasi data tentang berbagai sumber pendapatan daerah guna melakukan ekstensifikasi (pengembangan) sumber-sumber baru penerimaan sebagai pendapatan daerah.

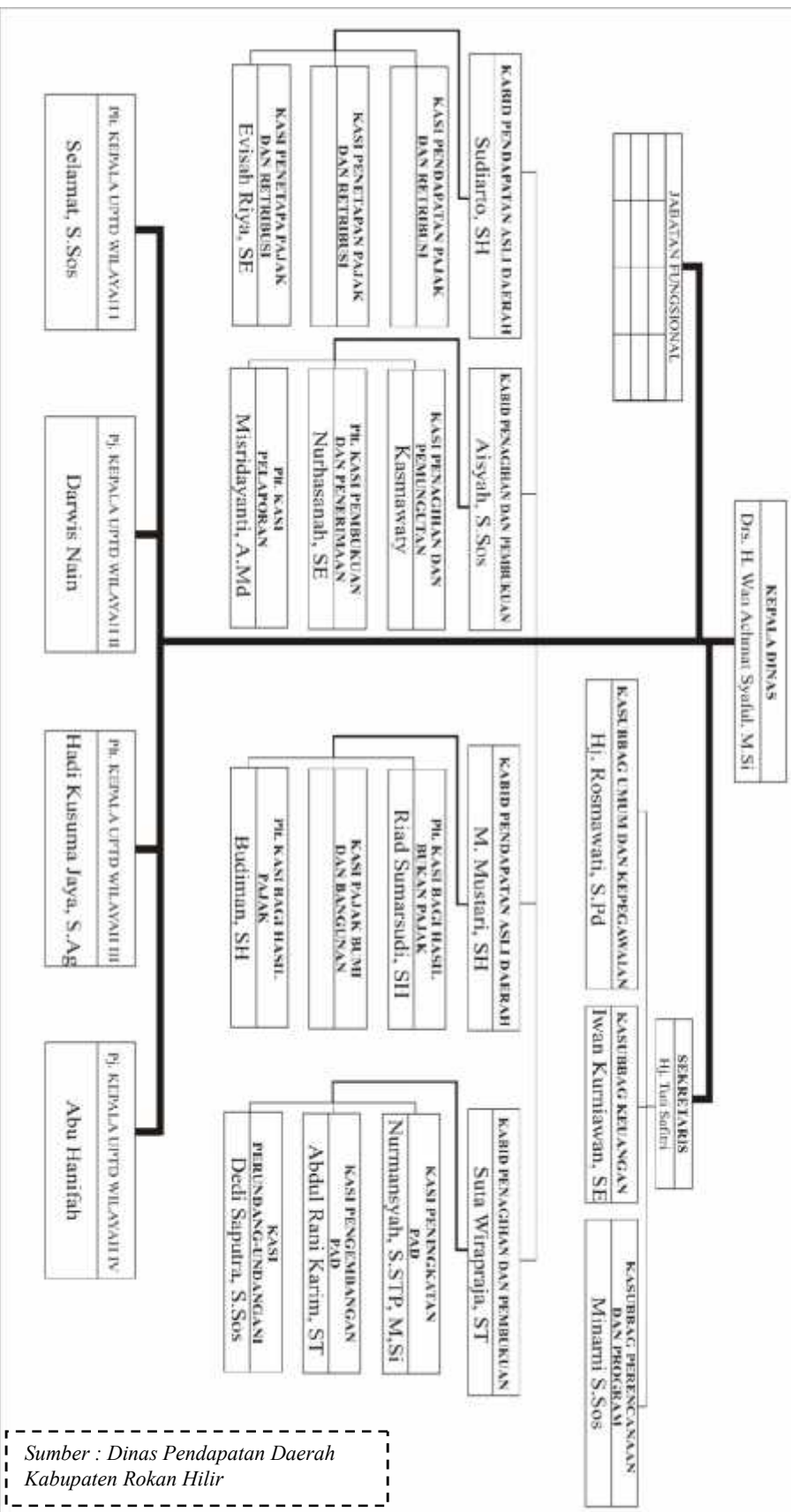
c. Seksi Perundang-Undangan

Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan dan perumusan kebijakan berupa peraturan-peraturan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan pemungutan dan penatausahaan penerimaan pendapatan daerah.

6. UPTD

UPTD adalah unit pelayanan teknis dinas yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis Dinas Pendapatan dilingkup kecamatan, kelurahan dan kepenghuluan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Rokan Hilir

Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. (peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel).

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel (Marihot p. Siahaan 2005:245). Pengertian pajak hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada. Penerimaan pajak hotel di kabupaten Rokan Hilir meliputi beberapa tahapan yang masuk ke dalam sistem penerimaan, yaitu Pendaftaran dan pendataan, Perhitungan dan penetapan, Pembukuan dan pelaporan, serta Pembayaran dan pemungutan/penagihan pajak hotel. Dari keempat sistem tersebut kemudian peneliti menjadikannya sebagai acuan atau indikator untuk melihat bagaimanakah sistem pelaksanaan penerimaan pajak hotel di kabupaten Rokan Hilir.

5.2. Hasil Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan (observasi), dan menyebarkan angket, maka dapat diketahui hasil jawaban dari setiap pertanyaan

yang telah diberikan kepada responden. Dengan demikian kita dapat mengetahui penerimaan pajak Hotel Kabupaten Rokan Hilir dari indikator-indikator yang dipecahkan menjadi daftar pertanyaan/angket.

5.2.1. Hasil Angket

Adapun aspek-aspek yang menjadi indikator untuk mengetahui pelaksanaan penerimaan pajak Hotel di Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak, dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pajak Hotel di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	2	12,50
2	Baik	2	12,50
3	Cukup Baik	3	18,75
4	Kurang Baik	4	25
5	Tidak Baik	5	31,25
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir, Mayoritas responden menjawab Tidak Baik yaitu sebanyak 5 orang atau 31,25% dari keseluruhan Responden, selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Baik yaitu sebanyak 4 orang atau 25% responden, dan yang paling sedikit adalah responden yang menjawab Sangat baik dan Baik yaitu hanya 2 orang atau 12,50% dari keseluruhan responden.

Banyaknya responden yang menjawab Tidak Baik dikarenakan dari hasil lapangan, peneliti menemukan bahwa masih banyak usaha penginapan dan Perhotelan yang belum melaksanakan pendaftaran dan pendataan hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pendaftaran dan pendataan badan usaha hotel oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir masih belum maksimal. Selanjutnya untuk mengetahui Tanggapan responden mengenai wajib pajak hotel yang tidak mendaftarkan usahanya sudah ditindak lanjuti dengan baik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Tanggapan Responden Mengenai Wajib Pajak Hotel Yang Tidak Mendaftarkan Usahanya Sudah Ditindaklanjuti Dengan Baik

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	2	12,50
2	Baik	1	6,25
3	Cukup Baik	3	18,75

4	Kurang Baik	4	25
5	Tidak Baik	6	37,50
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden mengenai wajib pajak hotel yang tidak mendaftarkan usahanya sudah ditindak lanjuti dengan baik, Mayoritas responden menjawab Tidak Baik yaitu sebanyak 6 orang atau 37,50% dari keseluruhan Responden, selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Baik yaitu sebanyak 4 orang atau 25% responden, dan yang paling sedikit adalah responden yang menjawab Baik yaitu hanya 1 orang atau 6,25% dari keseluruhan responden.

Banyaknya responden yang menjawab Tidak Baik dikarenakan masih belum ada tindaklanjut dari Dinas Pendapatan Daerah terhadap Badan Usaha yang belum mendaftarkan usaha Perhotelannya untuk kemudian dapat ditetapkan sebagai wajib pajak Hotel. Selanjutnya untuk mengetahui Tanggapan Responden Mengenai Kegiatan Pencatatan data Wajib Pajak Hotel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3 Tanggapan Responden Mengenai Kegiatan Pencatatan Data Wajib Pajak Hotel Telah Dilakukan Dengan Baik

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	2	12,50
2	Baik	1	6,25
3	Cukup Baik	2	12,50
4	Kurang Baik	5	31,25
5	Tidak Baik	6	37,50

Jumlah	16	100%
---------------	-----------	-------------

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden Mengenai Kegiatan Pencatatan data Wajib Pajak Hotel, Mayoritas responden menjawab Tidak Baik yaitu sebanyak 6 orang atau 37,50% dari keseluruhan Responden, selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Baik yaitu sebanyak 5 orang atau 31,25% responden, dan yang paling sedikit adalah responden yang menjawab Baik yaitu hanya 1 orang atau 6,25% dari keseluruhan responden.

Banyaknya responden yang menjawab Tidak Baik dikarenakan kegiatan pencatatan Data wajib Pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir belum dapat terlaksana dengan maksimal hal ini ditandai dengan kegiatan pencatatan belum mencakup seluruh usaha Perhotelan di seluruh Wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya untuk mengetahui Tanggapan Responden mengenai upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam Pengumpulan dan Penyusunan Subjek dan Objek Pajak Hotel Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel Berikut:

Tabel 5.4 Tanggapan Responden Mengenai upaya Dinas Pendapatan Dalam Pengumpulan dan Penyusunan Subjek dan Objek Pajak Hotel Kabupaten Rokan Hilir

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	2	12,50
2	Baik	1	6,25
3	Cukup Baik	3	18,75
4	Kurang Baik	4	25

5	Tidak Baik	6	37,50
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden mengenai upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam Pengumpulan dan Penyusunan Subjek dan Objek Pajak Hotel Kabupaten Rokan hilir, Mayoritas responden menjawab Tidak Baik yaitu sebanyak 6 orang atau 37,50% dari keseluruhan Responden, selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Baik yaitu sebanyak 4 orang atau 25% responden, dan yang paling sedikit adalah responden yang menjawab Baik yaitu hanya 1 orang atau 6,25% dari keseluruhan responden.

Banyaknya responden yang menjawab Tidak Baik dikarenakan bahwa masih banyak usaha perhotelan dan pemilik hotel yang belum terdata di *database* sehingga penerimaan pajak perhotelan belum mencapai target yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai prosedur yang ditetapkan pemerintah dalam pendaftaran dan pendataan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5 Tanggapan Responden Mengenai Prosedur yang Diterapkan Pemerintah dalam Pendaftaran dan Pendataan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	2	12,50
2	Baik	1	6,25
3	Cukup Baik	2	12,50
4	Kurang Baik	4	25
5	Tidak Baik	7	43,75
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden Mengenai prosedur yang ditetapkan pemerintah dalam pendaftaran dan pendataan, Mayoritas responden menjawab Tidak Baik yaitu sebanyak 7 orang atau 43,75% dari keseluruhan Responden, selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Baik yaitu sebanyak 4 orang atau 25% responden, dan yang paling sedikit adalah responden yang menjawab Baik yaitu hanya 1 orang atau 6,25% dari keseluruhan responden.

Banyaknya responden yang menjawab Tidak Baik dikarenakan responden yang mayoritas Pemilik Usaha Perhotelan berasumsi bahwa perosedur yang harus dilalui untuk mendaftarkan usahanya cukup berbelit-belit sehingga membuat wajib pajak perhotelan enggan untuk melaksanakan pendaftaran. Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden dari indikator Pendaftaran dan pendataan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6 Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Pendaftaran dan Pendataan

No	Soal	Kategori Jawaban					Jumlah
		SB	B	CB	KB	TB	
1	Pelaksanaan Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir	2	2	3	4	5	16
2	Wajib Pajak Hotel Yang Tidak Mendaftarkan Usahanya Sudah Ditindaklanjuti Dengan Baik	2	1	3	4	6	16
3	Kegiatan Pencatatan Data Wajib Pajak Hotel Telah	2	1	2	5	6	16

	Dilakukan Dengan Baik						
4	Upaya Dinas Pendapatan Dalam Pengumpulan dan Penyusunan Subjek dan Objek Pajak Hotel Kabupaten Rokan Hilir	2	1	3	4	6	16
5	Prosedur yang Diterapkan Pemerintah dalam Pendaftaran dan Pendataan	2	1	2	4	7	16
Rata-Rata		2	1	3	4	6	16
Persentase (%)		12,50	6,25	18,75	25	37,50	100%

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Keterangan :

SB : Sangat Baik

B : Baik

CB : Cukup Baik

KB : Kurang Baik

TB : Tidak Baik

Dari tabel rekapitulasi diatas, setelah masing-masing pertanyaan di olah dan di analisa kemudian di rangkum menjadi satu tabel rekapitulasi dan kemudian dicari rata-ratanya, dapat dilihat bahwa mayoritas responden menjawab Tidak Baik dari indikator Pendaftaran dan pendataan yaitu sebanyak 6 orang atau 37,50% responden, kemudian diikuti dengan responden yang menjawab Kurang baik yaitu sebanyak 4 orang atau 25% responden, dan yang paling sedikit yaitu responden yang menjawab Baik yaitu hanya 1 orang atau 6,25% responden.

Dari tabel rekapitulasi di atas, dapat kita lihat bahwa mayoritas responden rata-rata menjawab tidak baik, hal ini dikarenakan dari pengamatan peneliti dilapangan dan dari beberapa sumber yang peneliti wawancarai maka pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak hotel di Kabupaten Rokan Hilir Masih dalam Kategori Tidak Baik. Menanggapi hal tersebut, selanjutnya peneliti

mewawancarai salah seorang pemilik hotel yang belum mendaftarkan usaha perhotelannya sebagai berikut:

“kita Bukan tidak mau mendaftar, tetapi prosedur yang terlalu panjang dan rumit, serta masih banyak juga petugas yang “bermain” disitu, bikin kita enggan mau mendaftar (Wawancara dengan Bapak Tarmizi Salah Seorang pengusaha hotel pada tanggal 21 Desember 2012)

Dari hasil rekapitulasi dan wawancara diatas, dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa banyaknya pengusaha perhotelan yang tidak mendaftar dikarenakan selain rendahnya kesadaran mereka untuk mendaftar, faktor lain seperti prosedur yang rumit dan juga adanya penyalahgunaan wewenang dari pegawai Dispenda sehingga makin membuat pengusaha perhotelan enggan untuk mendaftarkan diri untuk kemudian didata dan dikenakan wajib pajak hotel.

2. Perhitungan dan Penetapan

Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan sistem self assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai hal tersebut dapat kita lihat pada hasil penyebaran angket/questioner sebagai berikut :

Tabel 5.7 Tanggapan Responden Mengenai Penetapan Pajak Hotel Dilaksanakan Dengan Melihat Pendapatan Pengusaha Hotel Sudah Dilaksanakan Dengan Baik

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	2	12,50
2	Baik	1	6,25

3	Cukup Baik	3	18,75
4	Kurang Baik	4	25
5	Tidak Baik	6	37,50
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden mengenai Penetapan Pajak Hotel Dilaksanakan Dengan Melihat Pendapatan Pengusaha Hotel Sudah Dilaksanakan Dengan Baik, Mayoritas responden menjawab Tidak Baik yaitu sebanyak 6 orang atau 37,50% dari keseluruhan Responden, selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Baik yaitu sebanyak 4 orang atau 25% responden, dan yang paling sedikit adalah responden yang menjawab Baik yaitu hanya 1 orang atau 6,25% dari keseluruhan responden.

Banyaknya responden yang menjawab Tidak Baik dikarenakan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan pajak hotel dengan tidak memperhatikan pendapatan pengusaha hotel dengan demikian penetapan jumlah pajak hotel yang harus dibayar masih dirasakan memberatkan pengusaha hotel. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan sosialisasi tentang ketetapan pajak hotel kepada wajib pajak dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8 Tanggapan Responden Mengenai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Melaksanakan Sosialisasi Tentang Ketetapan Pajak Hotel kepada Wajib Pajak Dengan Baik

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	2	12,5
2	Baik	1	6,25
3	Cukup Baik	2	12,50
4	Kurang Baik	5	31,25
5	Tidak Baik	6	37,50

Jumlah	16	100%
---------------	-----------	-------------

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden mengenai dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan sosialisasi tentang ketetapan pajak hotel kepada wajib pajak, Mayoritas responden menjawab Tidak Baik yaitu sebanyak 6 orang atau 37,50% dari keseluruhan Responden, selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Baik yaitu sebanyak 5 orang atau 31,25% responden, dan yang paling sedikit adalah responden yang menjawab Baik yaitu hanya 1 orang atau 6,25% dari keseluruhan responden.

Banyaknya responden menjawab tidak baik dikarenakan masih belum meratanya sosialisai mengenai ketetapan pajak yang dikenakan pada pengusaha perhotelan, hal ini yang menyebabkan adanya kerancuan bagi pengusaha Perhotelan untuk membayar pajak hotelnya. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai ketetapan pajak hotel yang telah dibuat oleh Dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir sudah telaksana dengan baik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.9 Tanggapan Responden Mengenai Ketetapan Pajak Hotel Yang Telah

Dibuat Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	1	6,25
2	Baik	2	12,5
3	Cukup Baik	2	12,5
4	Kurang Baik	4	25
5	Tidak Baik	7	43,75
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden mengenai penetapan pajak hotel yang telah dibuat oleh Dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir, Mayoritas responden menjawab Tidak Baik yaitu sebanyak 7 orang atau 43,75 % dari keseluruhan Responden, selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Baik yaitu sebanyak 4 orang atau 25 % responden, dan yang paling sedikit adalah responden yang menjawab Sangat Baik yaitu hanya 1 orang atau 6,25% dari keseluruhan responden.

Banyaknya responden yang menjawab tidak baik dikarenakan penetapan pajak hotel yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir masih dirasa memberatkan pengusaha perhotelan. Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden mengenai ketentuan Pajak Hotel yang dibayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan sudah terlaksana dengan baik dapat dilihat pada tabel berikut:

Taeb1 5.10 Tanggapan Responden Mengenai Ketentuan Pajak Hotel yang Dibayar sesuai dengan Tarif yang Telah Ditetapkan Sudah Terlaksana Dengan Baik

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	1	6,25
2	Baik	1	6,25
3	Cukup Baik	3	18,75
4	Kurang Baik	5	31,25
5	Tidak Baik	6	37,50
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden mengenai ketentuan Pajak Hotel yang dibayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan sudah terlaksana, Mayoritas responden menjawab Tidak Baik yaitu sebanyak 6 orang atau 37,50% dari keseluruhan Responden, selanjutnya diikuti dengan

responden yang menjawab Kurang Baik yaitu sebanyak 5 orang atau 31,25% responden, dan yang paling sedikit adalah responden yang menjawab sangat Baik dan Baik yaitu masing-masing hanya 1 orang atau 6,25% dari keseluruhan responden.

Banyaknya responden yang menjawab tidak baik dikarenakan pada kenyataan yang terjadi di lapangan banyak pengusaha yang membayar pajak tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, dimana ada dana tambahan yang harus dibayar oleh pengusaha perhotelan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan biaya Administrasi. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai ketetapan pajak hotel sudah terlaksana dengan baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.11 Tanggapan Responden Mengenai Ketetapan Pajak Hotel sudah terlaksana dengan baik

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	1	6,25
2	Baik	3	18,75
3	Cukup Baik	2	12,50
4	Kurang Baik	4	25
5	Tidak Baik	6	37,50
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden mengenai Kegiatan ketetapan pajak hotel sudah terlaksana dengan baik, Mayoritas responden menjawab Tidak Baik yaitu sebanyak 6 orang atau 37,50% dari keseluruhan Responden, selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Baik yaitu sebanyak 4 orang atau 25% responden, dan yang paling sedikit

adalah responden yang menjawab Sangat Baik yaitu hanya 1 orang atau 6,25% dari keseluruhan responden.

Banyaknya responden yang menjawab tidak baik karena pelaksanaan ketetapan tarif pajak dilapangan masih belum dapat terlaksana dengan maksimal hal tersebut ditandai dengan masih banyaknya pengusaha hotel yang tidak membayar pajak hotelnya. Selanjutnya untuk mengetahui Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Indikator Perhitungan dan penetapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.12 Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Perhitungan dan Penetapan

No	Soal	Kategori Jawaban					Jumlah
		SB	B	CB	KB	TB	
1	Penetapan Pajak Hotel Dilaksanakan Dengan Melihat Pendapatan Pengusaha Hotel Sudah Dilaksanakan Dengan Baik	2	1	3	4	6	16
2	Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Melaksanakan Sosialisasi Tentang Ketetapan Pajak Hotel kepada Wajib Pajak Dengan Baik	2	1	2	5	6	16
3	Ketetapan Pajak Hotel Yang Telah Dibuat Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	1	2	2	4	7	16
4	Ketentuan Pajak Hotel yang Dibayar sesuai dengan Tarif yang Telah Ditetapkan Sudah Terlaksana Dengan Baik	1	1	3	5	6	16
5	Kesalahan Ketetapan Pajak Hotel Dapat Merugikan Wajib Pajak	1	3	2	4	6	16
Rata-Rata		1	2	2	5	6	16
Persentase (%)		6,25	12,5	12,5	31,25	37,50	100%

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Keterangan :

SB : Sangat Baik

B : Baik

CB : Cukup Baik

KB : Kurang Baik

TB : Tidak Baik

Dari tabel rekapitulasi di atas, setelah masing-masing pertanyaan di olah dan dianalisa kemudian di rangkum menjadi satu tabel rekapitulasi dan kemudian dicari rata-ratanya, dapat dilihat bahwa mayoritas responden menjawab Tidak Baik dari indikator Perhitungan dan penetapan yaitu sebanyak 6 orang atau 37,50% responden, kemudian diikuti dengan responden yang menjawab Kurang baik yaitu sebanyak 5 orang atau 31,25% responden, dan yang paling sedikit yaitu responden yang menjawab Sangat Baik yaitu hanya 1 orang atau 6,25% responden.

Tingginya responden yang menjawab Tidak Baik dikarenakan kegiatan penghitungan dan penetapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah masih belum maksimal. Hal ini ditandai dengan masih banyak keluhan Dari wajib pajak perhotelan yang mengeluhkan akan tingginya biaya pajak yang harus dibayar dan tidak sebanding dengan pendapatan mereka.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah seorang wajib pajak hotel:

“kami masih mengeluhkan akan tingginya persentase pajak yang harus kami serahkan kepada pemerintah, sedangkan pendapatan kami tidak tentu, terkadang banyak tamu, tapi tidak jarang tamu sepi berkunjung ke hotel kami, saya rasa kalau bisa persentase beban pajak hotel sedikit dikurangkan” (wawancara dengan Bapak Acong salah seorang wajib

pajak hotel dibagan siapi-api Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 22 Desember 2012)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, salah satu penyebab dari pengusaha usaha perhotelan enggan untuk menyetorkan pajak hotelnya disebabkan karena tingginya angka persentase pembayaran pajak yang dikenakan kepada mereka oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

3. Pembukuan dan Pelaporan

Wajib pajak hotel dengan peredaran usahanya, Wajib menyelenggarakan pembukuan yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan, harga jual. Pembukuan adalah suatu proses penetapan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir. Untuk mengetahui tanggapan responden dari indikator pembukuan dan Pelaporan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 5.13 Tanggapan Responden Mengenai DISPENDA Kabupaten Rokan Hilir Telah Membuat Pembukuan Tentang Wajib Pajak Hotel yang

Terutang Dengan Baik

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	1	6,25
2	Baik	3	18,75
3	Cukup Baik	2	12,5
4	Kurang Baik	3	18,75
5	Tidak Baik	7	43,75
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden mengenai DISPENDA Kabupaten Rokan Hilir Telah Membuat Pembukuan Tentang Wajib Pajak Hotel yang Terutang Dengan Baik Mayoritas responden menjawab Tidak Baik yaitu sebanyak 7 orang atau 43,75% dari keseluruhan Responden, selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Baik dan Baik yaitu masing-masing sebanyak 3 orang atau 18,75% responden, dan yang paling sedikit adalah responden yang menjawab Sangat Baik yaitu hanya 1 orang atau 6,25% dari keseluruhan responden.

Masih banyaknya responden yang menjawab tidak baik dikarenakan pada kenyataan di lapangan, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan yang dilakukan oleh DISPENDA masih belum berjalan dengan optimal, hal ini ditandai dengan masih banyaknya pengusaha perhotelan yang belum terdata dan belum masuk dalam pembukuan serta pelaporan. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pembukuan dan pelaporan yang dibuat berdasarkan keadaan yang terjadi di lapangan yang disusun dengan baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.14 Tanggapan Responden Mengenai Pembukuan dan Pelaporan yang

Dibuat Berdasarkan Keadaan yang Terjadi Dilapangan yang Disusun Dengan Baik

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	1	6,25
2	Baik	2	12,5
3	Cukup Baik	2	12,5
4	Kurang Baik	4	25
5	Tidak Baik	7	43,75
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden mengenai pembukuan dan pelaporan yang dibuat berdasarkan keadaan yang terjadi di lapangan yang disusun dengan baik, Mayoritas responden menjawab Tidak Baik yaitu sebanyak 7 orang atau 43,75% dari keseluruhan Responden, selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Baik yaitu sebanyak 4 orang atau 25% responden, dan yang paling sedikit adalah responden yang menjawab Baik yaitu hanya 1 orang atau 6,25% dari keseluruhan responden.

Banyaknya responden yang menjawab tidak baik dikarenakan pelaksanaan pembukuan belum sesuai dengan keadaan di lapangan, hal ini berkaitan erat dengan belum maksimalnya pelaksanaan pendataan dan pendaftaran pengusaha perhotelan, dengan demikian hal tersebutlah yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan pembukuan dan pelaporan tersebut. Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden mengenai wajib pajak hotel yang tidak menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan ditindak lanjuti dengan baik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.15 Tanggapan Responden Mengenai Wajib Pajak Hotel yang tidak Menyelenggarakan Pembukuan dan Pelaporan Ditindak

Lanjutan

Dengan Baik

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	2	12,50
2	Baik	1	6,25
3	Cukup Baik	3	18,75
4	Kurang Baik	4	25
5	Tidak Baik	6	37,50
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden mengenai wajib pajak hotel yang tidak menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan ditindak lanjuti dengan baik, Mayoritas responden menjawab Tidak Baik yaitu sebanyak 6 orang atau 37,50% dari keseluruhan Responden, selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Baik yaitu sebanyak 4 orang atau 25% responden, dan yang paling sedikit adalah responden yang menjawab Baik yaitu hanya 1 orang atau 6,25% dari keseluruhan responden.

Banyaknya responden yang menjawab tidak baik dikarenakan pada kenyataan yang terjadi di lapangan masih banyak pengusaha perhotelan yang belum mendaftarkan usahanya untuk membayar pajak hotel belum ditindak tegas oleh Pemerintah, perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah kepada pengusaha hotel yang tidak mendaftarkan dirinya untuk membayar pajak hotel sehingga target yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Dapat tercapai dengan maksimal. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pelaporan pembukuan telah dilaksanakan dengan baik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.16 Tanggapan Responden Mengenai Pelaporan Pembukuan telah Dilaksanakan dengan Baik

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	1	6,25
2	Baik	1	6,25
3	Cukup Baik	2	12,5
4	Kurang Baik	5	31,25
5	Tidak Baik	7	43,75
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden mengenai pembukuan telah dilaksanakan dengan baik, Mayoritas responden menjawab Tidak Baik yaitu sebanyak 7 orang atau 43,75% dari keseluruhan Responden, selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Baik yaitu sebanyak 5 orang atau 31,25% responden, dan yang paling sedikit adalah responden yang menjawab Baik dan Sangat Baik yaitu masing-masing hanya sebanyak 1 orang atau 8,33% dari keseluruhan responden.

Banyaknya responden yang menjawab tidak baik dikarenakan masih perlu dilakukan perbaikan dan evaluasi khususnya mengenai pelaksanaan pembukuan dalam pemungutan pajak hotel. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak hotel sudah berjalan dengan baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.17 Tanggapan Responden Mengenai Pelaporan yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Hotel Sudah Berjalan dengan Baik

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	2	12,5
2	Baik	1	6,25
3	Cukup Baik	2	12,50
4	Kurang Baik	5	31,25
5	Tidak Baik	6	37,50
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden mengenai pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak hotel sudah berjalan dengan baik, Mayoritas responden menjawab Tidak Baik yaitu sebanyak 16 orang atau 37,50% dari keseluruhan Responden, selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Baik yaitu sebanyak 5 orang atau 31,25% responden, dan yang paling sedikit adalah responden yang menjawab Baik yaitu hanya 1 orang atau 6,25% dari keseluruhan responden.

Banyaknya responden yang menjawab tidak baik dikarenakan masih perlu dilakukan perbaikan dan evaluasi khususnya mengenai pelaksanaan pelaporan dalam pemungutan pajak hotel Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden dari indikator pembukuan dan pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.18 Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Indikator Pembukuan dan

Pelaporan

No	Soal	Kategori Jawaban					Jumlah
		SB	B	CB	KB	TB	
1	DISPENDA Kabupaten Rokan Hilir Telah Membuat Pembukuan Tentang Wajib Pajak Hotel yang Terutang Dengan Baik	1	3	2	3	7	16
2	Pembukuan dan Pelaporan yang Dibuat Berdasarkan Keadaan yang Terjadi	1	2	2	4	7	16

	Dilapangan yang Disusun Dengan Baik						
3	Wajib Pajak Hotel yang tidak Menyelenggarakan Pembukuan dan Pelaporan Ditindak Lanjuti Dengan Baik	2	1	3	4	6	16
4	Pelaporan Pembukuan telah Dilaksanakan dengan Baik	1	1	2	5	7	16
5	Pelaporan yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Hotel Sudah Berjalan dengan Baik	2	1	2	5	6	16
Rata-Rata		1	1	2	5	7	16
Persentase (%)		6,25	6,25	12,50	31,25	43,75	100%

Sumber : *Data olahan Tahun 2012*

Keterangan :

SB : Sangat Baik

B : Baik

CB : Cukup Baik

KB : Kurang Baik

TB : Tidak Baik

Dari tabel rekapitulasi di atas, setelah masing-masing pertanyaan di olah dan dianalisa kemudian dirangkum menjadi satu tabel rekapitulasi dan kemudian cari rata-ratanya, dapat dilihat bahwa mayoritas responden menjawab Tidak Baik dari indikator Perhitungan dan penetapan yaitu sebanyak 7 orang atau 43,75% responden, kemudian diikuti dengan responden yang menjawab Kurang baik yaitu sebanyak 5 orang atau 31,25% responden, dan yang paling sedikit yaitu responden yang menjawab Baik dan Sangat Baik yaitu masing-masih hanya sebanyak 5 orang atau 10,42% responden.

Tingginya jawaban responden yang memilih Tidak Baik dari indikator pembukuan dan pelaporan dikarenakan masih banyak usaha perhotelan yang belum terdata dan melakukan pelaporan untuk kemudian dapat dilaksanakan

kegiatan pembukuan, hal ini mengindikasikan masih belum optimalnya pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah khususnya pada kegiatan pembukuan dan pelaporan.

*“untuk masalah pembukuan dan pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah masih belum optimal, hal ini ditandai dengan masih banyak teman-teman pengusaha hotel yang lain yang belum tercatat dalam pembukuan, selain itu juga pengusaha hotel banyak yang sulit ditemui untuk dikonfirmasi dalam pembukuan dari dinas. kadang-kadang saya juga merasa tidak adil, selain itu juga tidak ada tindakan tegas dari pemerintah kepada oknum yang “bermain” di situ dan saya juga berharap teman-teman pengusaha hotel juga bisa sadar dan mau bayar pajak hotel mereka.”
(Wawancara dengan salah seorang pengusaha hotel pada tanggal 22 Desember 2012)*

Dari hasil wawancara dan rekapitulasi di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai kegiatan pembukuan dan pelaporan bahwa kegiatan tersebut masih belum dapat berjalan maksimal, hal ini salah satunya disebabkan kurangnya kerjasama antara pemilik usaha perhotelan dengan pihak pemerintah yang ditandai dengan tidak dilaksanakannya kegiatan pelaporan oleh pihak pengusaha perhotelan sehingga sulit untuk melakukan perhitungan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir sehingga dapat ditetapkan jumlah pajak yang harus dikenakan oleh pengusaha perhotelan.

4. Pembayaran dan Pemungutan / Penagihan

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam

proses pemungutan pajak, antara lain membentuk kolektor dengan menerbit SK kolektor dalam hal pemungutan tersebut. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai indikator tersebut dapat kita lihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 5.19 Tanggapan Responden Mengenai Prosedur dalam Pemungutan Dapat diikuti oleh Wajib Pajak Hotel dengan Baik

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	2	12,50
2	Baik	1	6,25
3	Cukup Baik	3	18,75
4	Kurang Baik	4	25
5	Tidak Baik	6	37,50
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden mengenai Prosedur dalam Pemungutan dapat diikuti oleh Wajib Pajak Hotel dengan Baik, Mayoritas responden menjawab Tidak Baik yaitu sebanyak 6 orang atau 37,50% dari keseluruhan Responden, selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Baik yaitu sebanyak 4 orang atau 25% responden, dan yang paling sedikit adalah responden yang menjawab Baik yaitu hanya 1 orang atau 6,25% dari keseluruhan responden.

Banyaknya responden yang menjawab tidak baik karena masih banyak pengusaha hotel yang kesulitan dalam melaksanakan pembayaran pajak hotel yang cenderung berbelit-belit. Hal inilah yang kemudian menyebabkan pengusaha enggan untuk membayar pajak hotelnya. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai hambatan yang dialami oleh petugas kolektor pada saat pemungutan pajak hotel dapat diselesaikan dengan baik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.20 Tanggapan Responden Mengenai Hambatan yang Dialami oleh Petugas Kolektor pada Saat Pemungutan Pajak Dapat di Selesaikan dengan Baik

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	2	12,50
2	Baik	1	6,25
3	Cukup Baik	2	12,50
4	Kurang Baik	4	25
5	Tidak Baik	7	43,75
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden mengenai hambatan yang dialami oleh petugas kolektor pada saat pemungutan pajak hotel, Mayoritas responden menjawab Tidak Baik yaitu sebanyak 7 orang atau 43,75% dari keseluruhan Responden, selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Baik yaitu sebanyak 4 orang atau 25% responden, dan yang paling sedikit adalah responden yang menjawab Baik yaitu hanya 1 orang atau 6,25% dari keseluruhan responden. Banyaknya responden yang menjawab tidak baik dikarenakan sulitnya pelaksanaan penagihan yang dilakukan oleh kolektor hal ini dikarenakan pengusaha hotel yang sulit untuk ditemui. Selanjutnya untuk mengetahui Tanggapan Responden Mengenai Pemungutan/Penagihan Yang Dilakukan Oleh DISPENDA Kabupaten Rokan Hilir Sudah Berjalan dengan Baik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.21 Tanggapan Responden Mengenai Pemungutan/Penagihan Yang Dilakukan Oleh DISPENDA Kabupaten Rokan Hilir Sudah Berjalan dengan Baik

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	1	6,25
2	Baik	2	12,5
3	Cukup Baik	3	18,75

4	Kurang Baik	3	18,75
5	Tidak Baik	7	43,75
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden mengenai Pemungutan/Penagihan Yang Dilakukan Oleh DISPENDA Kabupaten Rokan Hilir Sudah Berjalan dengan Baik, Mayoritas responden menjawab Tidak Baik yaitu sebanyak 7 orang atau 43,75% dari keseluruhan Responden, selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Baik dan Cukup Baik yaitu masing-masing sebanyak 3 orang atau 18,75% responden, dan yang paling sedikit adalah responden yang menjawab Sangat Baik yaitu hanya 1 orang atau 6,25% dari keseluruhan responden.

Banyaknya responden yang menjawab tidak baik dikarenakan pelaksanaan pemungutan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah masih dirasakan kurang maksimal hal ini ditandai dengan masih banyak pengusaha hotel yang belum terdaftar dan dipungut pajak hotelnya. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemungutan pajak hotel dilakukan oleh kolektor yang berwenang terhadap setiap wajib pajak sudah berjalan dengan baik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.22 Tanggapan Responden Mengenai Pemungutan Pajak Hotel Dilakukan Kolektor yang Berwenag Terhadap setiap Wajib Pajak

Sudah Berjalan dengan Baik

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	1	6,25
2	Baik	1	6,25
3	Cukup Baik	2	12,5
4	Kurang Baik	5	31,25

5	Tidak Baik	7	43,75
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden mengenai Pemungutan pajak hotel dilakukan kolektor yang berwenang terhadap setiap wajib pajak sudah berjalan dengan baik, Mayoritas responden menjawab Tidak Baik yaitu sebanyak 7 orang atau 43,75% dari keseluruhan Responden, selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Baik yaitu sebanyak 5 orang atau 31,25% responden, dan yang paling sedikit adalah responden yang menjawab Baik dan sangat baik yaitu masing-masing hanya 1 orang atau 6,25% dari keseluruhan responden.

Banyaknya responden yang menjawab tidak baik dikarenakan masih pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh kolektor yang berwenang masih belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini ditandai dengan masih belum tercapainya target yang ditentukan oleh Dispenda untuk pajak hotel. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.23 Tanggapan Responden Mengenai Sistem dan Prosedur yang Ditetapkan Oleh Pemerintah dalam pemungutan pajak Dapat Berjalan dengan Baik

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	1	6,25
2	Baik	2	12,50
3	Cukup Baik	3	18,75
4	Kurang Baik	3	18,75
5	Tidak Baik	7	43,75
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden mengenai sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik Mayoritas responden menjawab Tidak Baik yaitu sebanyak 7 orang atau 43,75% dari keseluruhan Responden, selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Cukup Baik dan Kurang Baik yaitu masing-masing sebanyak 3 orang atau 18,75% responden, dan yang paling sedikit adalah responden yang menjawab Sangat Baik yaitu hanya 1 orang atau 6,25% dari keseluruhan responden.

Banyaknya responden yang menjawab tidak baik dikarenakan dirasakan masih berbelitnya sistem dan prosedur yang harus dilaksanakan oleh pengusaha perhotelan sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dan hak perpajakannya. Selanjutnya untuk mengetahui Rekapitulasi tanggapan responden dari indikator pembayaran dan pemungutan/penagihan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.24 Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Pembayaran dan Pemungutan / Penagihan

No	Soal	Kategori Jawaban					Jumlah
		SB	B	CB	KB	TB	
1	Prosedur dalam Pemungutan Dapat diikuti oleh Wajib Pajak Hotel dengan Baik	2	1	3	4	6	16
2	Hambatan yang Dialami oleh Petugas Kolektor pada Saat Pemungutan Pajak Dapat di Selesaikan dengan Baik	2	1	2	4	7	16
3	Pemungutan / Penagihan Yang Dilakukan Oleh DISPENDA Kabupaten Rokan Hilir Sudah Berjalan dengan Baik	1	2	3	3	7	16
4	Pemungutan Pajak Hotel Dilakukan Kolektor yang Berwenag Terhadap setiap Wajib Pajak Sudah Berjalan dengan Baik	1	1	2	5	7	16
5	Sistem dan Prosedur yang Ditetapkan Oleh Pemerintah dalam pemungutan pajak Dapat Berjalan dengan Baik	1	2	3	3	7	16
Rata-Rata		1	1	3	4	7	16
Persentase (%)		6,25	6,25	18,75	25	43,75	100%

Sumber : *Data olahan Tahun 2012*

Keterangan :

SB : Sangat Baik

B : Baik

CB : Cukup Baik

KB : Kurang Baik

TB : Tidak Baik

Dari tabel rekapitulasi di atas, setelah masing-masing pertanyaan diolah dan dianalisa kemudian di rangkum menjadi satu tabel rekapitulasi dan kemudian cari rata-ratanya, dapat dilihat bahwa mayoritas responden menjawab Tidak Baik dari indikator Pembayaran dan Pemungutan/Penagihan yaitu sebanyak 7 orang atau 43,75 % responden, kemudian diikuti dengan responden yang menjawab Kurang baik yaitu sebanyak 4 orang atau 25% responden, dan yang paling sedikit yaitu responden yang menjawab Baik dan Sangat Baik yaitu masing-masing hanya 1 orang atau 6,25% responden.

Tingginya responden yang menjawab tidak baik dikarenakan kegiatan pemungutan/penagihan belum terlaksana dengan optimal, hal ini ditandai dengan pelaksanaan pemungutan yang belum merata, selain itu juga masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh pegawai yang tidak bertanggungjawab seperti pernyataan salah seorang wajib pajak yang peneliti wawancarai yaitu sebagai berikut:

*“saya menilai pemungutan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah Kab. Rokan Hilir ini masih belum baik, saya lihat masih banyak pengusaha-pengusaha hotel yang tidak dimintai pajaknya, selain itu banyak oknum yang bermain disitu, membayar pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tetapi tidak diserahkan kepada kas daerah”***(Wawancara dengan salah seorang menejer hotel pada tanggal 22 Desember 2012)**

Dari hasil wawancara dan rekapitulasi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih banyak pengusaha perhotelan yang belum terdaftar dan membayar pajak perhotelan,

selain itu masih banyak pegawai pemungut pajak yang menyalahgunakan wewenangnya dalam pemungutan pajak perhotelan tersebut.

5.3. Pembahasan

Setelah menjelaskan hasil penelitian dari observasi, angket dan wawancara dalam penjelasan di atas, maka berikut ini akan di jelaskan pembahasan tentang hasil rekapitulasi dari keseluruhan penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Rekapitulasi Quesioner

Angket/Quesioner yang telah dibagikan kemudian di klasifikasikan dan dianalisa dalam bentuk tabel-tabel perindikatornya, kemudian dari setiap indikator di analisa dan diolah kedalam bentuk tabel rekaptulasi indikator, setelah keseluruhan indikator di rekapitulasikan maka pembahasan akhir adalah Rekapitulasi Keseluruhan Indikator yang dijadikan tolok ukur dalam penilaian pelaksanaan penerimaan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah terebut. Untuk mengetahui Rekapitulasi Keseluruhan Quesioner, dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 5.25 Rekapitulasi Keseluruhan Quesioner.

No	Indikator	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	Jumlah
1	Pendaftaran Dan Pendataan	2	1	3	4	6	16
2	Perhitungan dan penetapan	1	2	2	5	6	16

3	Pembukuan dan Pelaporan	1	1	2	5	7	16
4	Pemungutan / penagihan	1	1	3	4	7	16
Jumlah		5	5	10	18	26	64

Sumber : Data olahan 2012

Selanjutnya untuk mengetahui hasil tabulasi dalam menilai jawaban responden pada masing-masing pertanyaan dapat dilakukan dengan cara sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Ari Kunto (2003:43) sebagai berikut ini:

$$\begin{aligned}
 \text{Sangat Baik} & : 5 \times 5 = 25 \\
 \text{Baik} & : 4 \times 5 = 20 \\
 \text{Cukup Baik} & : 3 \times 10 = 30 \\
 \text{Kurang Baik} & : 2 \times 18 = 36 \\
 \text{Tidak Baik} & : \frac{1 \times 26 = 26}{256} + \frac{137 \times 100}{256} = 53,51\%
 \end{aligned}$$

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan penerimaan pajak hotel oleh Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dari keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Suhairimi Ari Kunto (2003:171), sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Baik} & : 67-100 \% \\
 \text{Kurang Baik} & : 31-66 \% \\
 \text{Tidak Baik} & : 0-33 \%
 \end{aligned}$$

Dari tabel rekapitulasi seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir masih dalam kategori Kurang Baik atau belum Optimal

hal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan 53,51%. Dikatakan Kurang Baik / Belum Optimal karena pelaksanaan penerimaan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang diukur melalui keempat indikator tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal dan masih banyak terjadi masalah dilapangan baik dari Dinas Pendapatan Daerah maupun dari pihak pengusaha Perhotelan, Seharusnya keempat indikator tahapan yaitu pendaftaran dan pendataan, perhitungan dan penetapan, pembukuan dan pelaporan sampai pada pemungutan/penagihan dilaksanakan semaksimal mungkin karena keempat faktor inilah yang menentukan optimal atau tidaknya penerimaan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tersebut.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya mengenai analisis penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, maka selanjutnya dapat diambil kesimpulan sebagai akhir dari penulis dan juga menjawab permasalahan ini yaitu sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan Pendataan

Dari hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden menilai pendaftaran dan pendataan masih dalam kategori Tidak Baik yaitu rata-ratanya sebanyak 6 orang atau 37,50% dari keseluruhan jumlah responden yang mengatakan demikian pada tabel rekapitulasi indikator pendafrtan dan pendataan, hal ini dikarenakan banyaknya pengusaha perhotelan yang tidak mendaftar dikarenakan selain rendahnya kesadaran mereka untuk mendaftar, faktor lain seperti prosedur yang rumit dan juga adanya penyalah gunaan wewenang dari pegawai Dispenda sehingga makin membuat pengusaha perhotelan enggan untuk mendaftarkan diri untuk kemudian didata dan di kenakan wajib pajak hotel.

2. Perhitungan dan penetapan

Dari hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden menilai perhitungan dan penetapan masih dalam kategori Tidak Baik yaitu rata-ratanya sebanyak 6 orang atau 37,50% dari keseluruhan jumlah responden yang mengatakan demikian pada tabel rekapitulasi indikator perhitungan dan penetapan, hal ini dikarenakan kegiatan penghitungan dan penetapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah masih belum maksimal. Hal ini ditandai dengan masih banyak keluhan Dari wajib pajak perhotelan yang mengeluhkan akan tingginya biaya pajak yang harus dibayar dan tidak sebanding dengan pendapatan mereka.

3. Pembukuan dan pelaporan

Dari hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden menilai pembukuan dan pelaporan masih dalam kategori Tidak Baik yaitu rata-ratanya sebanyak 7 orang atau 43,75% dari keseluruhan jumlah responden yang mengatakan demikian pada tabel rekapitulasi indikator pembukuan dan pelaporan, hal ini dikarenakan masih banyak usaha perhotelan yang belum terdata dan melakukan pelaporan untuk kemudian dapat dilaksanakan kegiatan pembukuan, hal ini mengindikasikan masih belum optimalnya pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah khususnya pada kegiatan pembukuan dan pelaporan.

4. Pembayaran dan pemungutan/penagihan

Dari hasil penelitian menunjukan mayoritas responden menilai pembayaran dan pemungutan/penagihan masih dalam kategori Tidak Baik yaitu rata-ratanya sebanyak 7 orang atau 43,75% dari keseluruhan jumlah responden yang mengatakan demikian pada tabel rekapitulasi indikator pembayaran dan pemungutan/penagihan, hal ini dikarenakan kegiatan pemungutan/penagihan belum terlaksana dengan optimal, hal ini ditandai dengan pelaksanaan pemungutan yang belum merata.

6.2. Saran

Dari hasil pembahasan penelitian yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya, disini peneliti akan memberikan saran sekiranya dapat bermanfaat dan sebagai langkah awal untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel. adapun saran dari peneliti adalah:

1. Wajib pajak hotel disarankan agar senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan tentang pembayaran pajak yang telah ditetapkan pada waktunya dan tidak menunda pembayarannya, karena partisipasi pembayaran pajak adalah keikutsertaan dalam mendukung suksesnya pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah.
2. Bagi wajib pajak yang menunda membayar pajak dan yang tidak membayar pajak hendaknya diberikan sanksi administrasi yang tegas dan objektif dari Dinas Pendapatan Daerah selaku pelaksanaan pemungutan pajak hotel sehingga peraturan dapat terealisasi secara baik.

3. Diharapkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku pelaksanaan pemungutan pajak hotel sebaiknya lebih memperhatikan sistematika pemungutan, prosedur pemungutan serta hambatan dalam pemungutan yang dilakukan oleh kolektor, pada saat pemungutan/ penagihan pajak hotel.
4. Penegakan hukum agar lebih diterapkan dan dijalankan sesuai dengan perundang-undangan tentang pajak daerah yang berlaku serta berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2009. *Materi perkuliahan Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Fekonso Uin Suska Riau ; Pekanbaru.
- Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 29
- Agustinus, sonny dkk. 2009. *Perpajakan*. Andi jogjakarta; Jakarta
- Arikunto, Suharmi. 2003. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta; Jakarta
- Bohari. 2001. *Pengantar Hukum Pajak*. Rajawali pers ; Jakarta
- Fidel. 2010. *Perpajakan*. Murai Kencana; Jakarta
- Gusfahmi. 2007. *Pajak menurut syariah*. Rajawali pers; Jakarta
- Harahap, azwar. 2007. *Keuangan Negara*. uin suska press; Pekanbaru
- Harsono, 2011. *Sistem Administrasi Kepegawaian*. Fokusmedia; Bandung
- Ilyas, Wirawan B dkk. 2008. *Hukum Pajak*. Salemba Empat; Jakarta
- Kurnia Rahayu, Siti. 2010. *Perpajakan diindonesia*. Graha Ilmu; Yogyakarta
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Cv Andi; Yogyakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
- Rosdiana, Haula dkk. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak*. RajaGrafindo Persada; Jakarta
- Siahaan, Marhot p. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers; Jakarta
- Singarimbun, Masri. 2005. *Metode penelitian survai*. LP3ES ; Jakarta

- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat; Jakarta
- Sutedi, Adrian, 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Ghalia Indonesia; Bogor
- Soemarso. 2007. *Perpajakan*. Salemba Empat; Jakarta
- Soemitro, Rochmat. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama; Bandung
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Ikatan Penerbit Indonesia; Bandung
- Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 2004
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat; Jakarta
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Rajawali Press; Jakarta
- Zainul Basri, Yuswar dkk. 2005. *Keuangan Negara dan Analisi Kebijakan Utang Luar Negeri*. RajaWali Pers; Jakarta

KUISIONER PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN :

**“ ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR”**

I. KETERANGAN

1. Kuisioner ini disebarakan hanya untuk melengkapi skripsi yang sedang saya kerjakan dan ini hanya merupakan karya ilmiah.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan tidak ada pengaruhnya terhadap pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara/i.
3. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/I berikan akan kami jaga kerahasiaannya.
4. Jawaban yang sesuai menurut Responden harap dilingkar atau diberi tanda silang (X)
5. Atas partisipasi dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/I selalu dalam lindungan Allah SWT.
Amin.

II. IDENTITAS PENELITI

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| 1) Nama | : Ayu Lestari |
| 2) Nim | : 10975008156 |
| 3) Jurusan | : Administrasi Negara/Strata Satu |
| (SI) | |
| 4) Fakultas | : Ekonomi dan Ilmu Sosial |
| 5) Universitas | : UIN Suska Riau |

III. IDENTITS RESPONDEN

Jenis Kelamin :
Umur : Tahun
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :

IV. DAFTAR PERTANYAAN

1. Sistem Penerimaan Pajak Hotel

A. Pendaftaran dan pendataan

1. Bagaimanakah menurut Bapak/ibu pendaftaran dan pendataan pajak hotel pada dinas pendapatan daerah kabupaten Rokan Hilir, apakah sudah terlaksana dengan baik ?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
2. Bagaimanakah menurut Bapak/ibu dengan wajib pajak hotel yang tidak mendaftarkan usahanya melalui dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir sudah ditindak lanjuti dengan baik ?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
3. Apakah menurut Bapak/ibu kegiatan mencatat data-data tentang wajib pajak hotel Kabupaten Rokan Hilir sudah dilakukan dengan baik ?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

4. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu upaya Dinas Pendapatan dalam pengumpulan dan penyusunan data mengenai subjek dan objek pajak hotel yang ada di kabupaten Rokan Hilir apakah sudah terlaksana dengan baik?
- a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
5. Apakah prosedur yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal pendaftaran dan pendataan dapat berjalan dengan baik?
- a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

B. Perhitungan dan Penetapan

1. Apakah penetapan pajak hotel sering dilaksanakan dengan melihat nilai pendapatan pengusaha hotel sudah dilaksanakan dengan baik ?
- a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
2. Apakah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sudah melakukan sosialisasi dengan baik tentang ketetapan pajak hotel kepada wajib pajak ?
- a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
3. Apakah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sudah baik membuat ketetapan Pajak hotel ?
- a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

4. Apakah ketentuan pajak hotel yang dibayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan sudah terlaksana dengan baik ?
- a. Sangat Baik c. Cukup Baik e. Tidak Baik
b. Baik d. Kurang Baik
5. Apakah sudah terlaksana dengan baik ketetapan pajak hotel yang dibuat oleh DISPENDA Kabupaten Rokan Hilir ?
- a. Sangat Baik c. Cukup Baik e. Tidak Baik
b. Baik d. Kurang Baik

C. Pembukuan dan Pelaporan

1. Apakah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah membuat pembukuan tentang wajib pajak hotel yang terutang dengan baik ?
- a. Sangat Baik c. Cukup Baik e. Tidak Baik
b. Baik d. Kurang Baik
2. Apakah pembukuan dan pelaporan yang dibuat tersebut berdasarkan keadaan yang terjadi dilapangan dan apakah sudah disusun dengan baik ?
- a. Sangat Baik c. Cukup Baik e. Tidak Baik
b. Baik d. Kurang Baik
3. Bagaimanakah dengan para wajib pajak hotel yang tidak menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan apakah sudah ditindak lanjuti dengan baik ?
- a. Sangat Baik c. Cukup Baik e. Tidak Baik
b. Baik d. Kurang Baik

4. Bagaimanakah dengan pelaporan dan pembukuan apakah sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir ?
- a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
5. Apakah pelaporan yang dilakukan oleh para wajib pajak hotel sudah berjalan dengan baik ?
- a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

D. Pemungutan/ Penagihan

1. Apakah prosedur dalam pemungutan, wajib pajak hotel mampu mengikuti dengan baik ?
- a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
2. Apakah hambatan yang dialami oleh petugas kolektor pada saat pemungutan pajak dapat diselesaikan dengan baik ?
- a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
3. Apakah peraturan pemungutan/penagihan yang dilakukan oleh dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sudah berjalan dengan baik ?
- a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

4. Apakah pemungutan pajak hotel dilakukan kolektor yang berwenang terhadap setiap wajib pajak sudah berjalan dengan baik ?
- a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
5. Apakah sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik ?
- a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik